



RISALAH RAPAT KOMISI IV DPR RI
BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN,
SERTA PERUM BULOG

Tahun Sidang	:	2018-2019
Masa Persidangan	:	V
Rapat ke-	:	-
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	:	Tertutup – Terbuka
Dengan	:	Dirut Perum Bulog
Hari, Tanggal	:	Kamis, 20 Juni 2019
Waktu	:	10.00 WIB s.d. selesai
Acara	:	Membahas Subsidi Pangan pada RAPBN Tahun 2020
Ketua Rapat	:	Edhy Prabowo, M.M., M.B.A. (Ketua Komisi IV DPR RI)
Sekretaris Rapat	:	Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir	:	25 anggota dari 47 Anggota 1. Budi Waseso (Direktur Utama Perum Bulog); 2. Triyana (Direktur Keuangan);
Hadir Mitra Kerja	:	3. Tri Wahyudi Shaleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik); beserta jajaran.

KOMISI IV DPR RI:

1. EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.
2. Drs. H. ROEM KONO
3. Dr. MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.
4. VIVA YOGA MAULADI, M.Si.
5. DANIEL JOHAN
6. SUDIN
7. Drs. I MADE URIP, M.Si.
8. Ir. MINDO SIANIPAR
9. ONO SURONO, S.T.
10. AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.
11. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.
12. H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.
13. H. AGUNG WIDYANTORO, S.H., M.Si.
14. ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.
15. Ir. EDDY KUNTADI
16. Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.
17. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
18. dr. FELICITAS TALLULEMBANG
19. Ir. H. MUHAMMAD NASYIT UMAR, S.P.
20. Drs. H. UMAR ARSAL
21. Dr. Drs. YUS SUDARSO, S.H., M.H.
22. M. IRWAN ZULFIKAR, M.B.A.
23. H. ACEP ADANG RUHIAT, M.Si.
24. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, S.Ag.
25. DR. HERMANTO, S.E., M.M.
26. Hj. KASRIAH
27. H. ASEP AHMAD MOUSHUL AFFANDY
28. Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.
29. Drs. FADHOLI

ANGGOTA YANG IJIN:

1. Ir. EFFENDI SIANIPAR
2. RIDWAN ANDI WITTIRI
3. Ir. TAGORE ABUBAKAR
4. DJENDRI ALTING KEINTJEM, S.H., M.H.
5. ROBERT JOPPY KARDINAL, S.A.B.
6. A. A BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA
7. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
8. SUSI SYAHDONNA MARLENY BACHSIN, S.E., M.M.
9. Drs. H. GUNTUR SASONO. M.Si.
10. VIVI SUMANTRI JAYABAYA, S.Sos.

11. EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
12. Drs. H. IBNU MULTAZAM
13. Dr. H. ANDI AKMAL PASLLUDDIN, S.P., M.M.
14. Drs. H. MAHFUZ SIDIK, M.Si.
15. Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI, M.Si.
16. SULAEMAN L. HAMZAH
17. Drs. MUCHTAR LUTHFI A. MUTTY, M.Si.
18. Dr. ERISLAN, S.T., M.M.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/F-PG (Drs. H. ROEM KONO)

**Yang terhormat Pimpinan Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Saudara Direktur Utama Perum Bulog serta jajarannya, serta
hadirin yang saya hormati.**

(Suaranya Kecil)

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat Rahmat dan Hidayahnya kita dapat melaksanakan rapat dalam keadaan sehat wal'afiat, guna menjalankan salah satu tugas dan fungsi DPR RI yaitu tugas anggaran.

Sesuai dengan jadwal acara rapat masa persidangan tahun 2018-2019 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah antara Pimpinan DPR dengan Fraksi tanggal 20 Maret 2019 dan keputusan rapat Internal Komisi IV DPR RI tanggal 14 Mei 2019, serta menindak lanjuti surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI tanggal 8 Mei 2019 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RABPN tahun 2020, dan rencana kerja Pemerintah tahun 2020.

Pada hari ini 20 Juni 2019 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direksi Utama Perum Bulog membahas RKKL dan RKPL, KLPA 2020, Evaluasi Pelaksana Anggaran periode 1 dan isu-isu penting.

Sebelum dilanjutkan masih dalam suasana bulan Syawal, perkenankan kami mengucapkan Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Hadirin yang kami hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini dapat Rapat Dengar Pendapat telah jadi dari dan ditanda tangani oleh 25 Anggota dan 9 Fraksi. Sesuai

dengan ketentuan Pasal 24 perihal 246 dan Pasal 251 Ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, RDP ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sesuai undangan Rapat Dengat Pendapat ini dimulai jam 10:00, tapi kita mengundurkan 12:05 dan saya mohon persetujuan Bapak-Bapak sekalian.

USUL:

Usul-usul Pak,

Karena memang sudah terlambat, tadikan beberapa Direktur hadir. Sekarang cuman beliau, kalau ada salah satu mendampingi duluan.

Silakan.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak.

Sedang solat,

Meraka tidak berani meninggalkan sini, kecuali interuksi dari pada Dirut Pak. Kita sudah tau Dirut mana ada yang berani meninggalkan beliau, pasti kembali.

Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 Peraturan Tata Tertib dan atau sesuai kesepakatan bersama dengan acara rapat sebagai berikut.

1. Pengantar Ketua,
2. Penjelasan Umum Bulog mengenai RKKL dan lain-lain,
3. Jawaban atau tanggapan Kesimpulan Keputusan Rapat dan,
4. Penutup.

Disetujui saudara-saudara sekalian?

(RAPAT: SETUJU)

Ketahanan pangan merupakan masalah kompleks yang penanganannya masih memerlukan sinergitas dari seluruh sector pembangunan. Dalam mengatasi masalah tersebut dibutuhkan upaya yang bertujuan mencapai ketahanan pangan dan mengupayakan agar resiko kerawanan pangan dapat diperkecil. Pada kesempatan kali ini kami memberikan apresiasi kepada Perum Bulog dapat bekerja secara maksimal, membantu Pemerintah dalam mengatasi permasalahan pangan di beberapa wilayah.

Disamping itu Komisi IV DPR RI juga memberikan apresiasi atas realisasi kinerja Perum Bulog pada 19 Juni 2019 yaitu kegiatan pengadaan setara beras yaitu 676.501 ton, penyaluran bansos serta ras-ras sebesar 94,84% atau 279.443 ton dari SPP terbitan alokasi Januari Juni 2019 sebesar 294.654 ton, dan penyaluran candangan beras Pemerintah dan juga ketersediaan pasokan nastarbitas harga, dan bencana alam

yaitu 15,16 atau 227.456 ton dari 100 setengah juta ton. Saya kira ini apresiasi harus kita berikan, tapi harus dibarengi dengan tepuk tangan.

Terima kasih.

Belum pernah ada yang tepuk tangan Pak setiap rapat, baru Bapak sekarang.

Masalah pangan khususnya terkait dengan ketersediaan pasokan dan distribusi pada tahun 2020 merupakan prioritas dalam mengendalikan bagi Pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi. Dalam mendukung program Pemerintah untuk mewujudkan komoditas pangan yang memiliki daya saing Internasional, menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, perbaikan tata niaga pangan, serta menjaga pemenuhan pasokan dalam negeri guna menjaga stabilitas harga pangan. Oleh karena itu Komisi DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai APBN Perum Bulog tahun anggaran 2020.

Hadirin yang saya hormati,

Pada pertemuan kali ini kami ingin mendapatka penjelasan terkait dengan perkembangan sensitivitas Pemerintah terhadap intruksi Presiden tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah beras, dan penyaluran beras oleh Pemerintah yang hingga saat ini belum mengalami perubahan, sehingga harga pembelian Pemerintah masih menggunakan harga dan tidak relevan jika digunakan untuk saat ini, sehingga mempengaruhi kinerja Perum Bulog dalam penyerap gabah atau beras dari Petani.

Terkait dengan isu lainnya kami mendapatkan informasi jika masyarakat keluarga penerima manfaat kurang berminat untuk membeli produk Bulog, khususnya beras Bulog karena kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan beras non Bulog. Oleh karena itu Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai sejauh mana kesiapan dan kordinasi Perum Bulog dengan Pemerintah, terkait progam bantuan pangan non tunai atau BNT tersebut.

**Saudara Direktur Perum Bulog yang saya hormati,
Yang kami hormati.**

Demikian pengantar kami sampaikan selanjutnya sesuai acara yang telah kita sepakati, kami persilakan Direktur Utama Bulog memberikan penjelasan.

Kami persilakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (Drs. BUDI WASESO):

***Bissmillahirrohmaanirrohiem
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

Selamat Siang,

**Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,
Om Swastiastu.**

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Anggota Komisi IV DPR RI.**

Memenuhi undangan Sekretaris Jenderal nomor BW08413 DPR RI VI 2019 tanggal 12 Juni 2019, pelihar undangan Rapat Dengar Pendapat bersama ini kami sampaikan penjelasan Perum Bulog mengenai RKA Perum Bulog dalam RAPBN tahun 2020.

Sebelum melanjutkan ke dalam penyajian bahasan oleh karena masih dalam suasana lebaran, izinkan lah kami beserta seluruh jajaran Perum Bulog mengucapkan, Selamat Idul Fitri 1440 Hijriah Mohon Maaf dan Lahir Batin.

Bapak, Ibu, Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Ketahanan pangan merupakan pilar bagi pembangunan sector-sektro lainnya, karena tidak satu pun negara dapat membangun perekonomiannya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan pangannya. Secara sectoral kebijakan Pemerintah dalam ketahanan pangan saat ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan perberasan, karena bagi Indonesia beras masih merupakan komoditas pangan yang paling strategis. Perum Bulog sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Perum Bulog, merupakan alat Pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional seperti yang tercantup pada Inpres nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah atau beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah.

Simpul mata rantai ketahanan pangan dalam penugasan pabrik Perum Bulog adalah mencakup dari;

1. Yang pertamapengadaan dengan tujuan mengamankan stok beras yang sesuai dengan harga pembelian Pemerintah atau APP dengan standar beras yang sesuai dengan Inpres yang berlaku atau Inpres nomor 5 tahun 2015.
2. Yang kedua penyediaan atau penyimpanan yakni mencakup dalam berbagai aspek ketahanan dan ketersediaan pangan manakala negara membutuhkan pasokan beras.
3. Perawatan stok dengan tujuan agar kualitas beras tetap terpelihara.
4. Pemerataan stol mendukung ketersediaan stok beras diseluruh Indonesia sehingga menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan pokok yang tersedian diseluruh wilayah Indonesia.
5. Distribusi beras untuk penyaluran beras yang meliputi distribusi rastra CBP golongan anggaran dan penyaluran lainnya.

Bapak, Ibu, Pimpinan, serta anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Selanjutnya penugas Perum Bulog untuk ketahanan pangan sesuai dengan Inpres nomor 5 2015 tentang perberasan antara lain yaitu;

1. Melaksanakan kebijakan pembelian gabah atau beras dalam negeri dengan ketentuan HPP melalui pengadaan gabah atau beras dalam negeri yang bertujuan untuk menjaga harga ditingkat Petani dan menjaga kecukupan stok. Hal ini dilakukan untuk mendukung pilar ketersediaan.
2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah melalui program bansos rastra dengan tujuan untuk mendukung pilar keterjangkauan.
3. Menyediakan dan menyalurkan beras untuk menjaga stabilitas harga beras, menanggulangi keadaan darurat, bencana dan rawan pangan melalui pengolahan CBP yang bertujuan mendukung pilar stabilitas.

Berdasarkan 3 intisari penugas Perum Bulog tersebut di atas maka melalui penyaluran rastra dan pengelolaan cadangan beras Pemerintah atau CBP biarkan dapat memperkuat pilar keterjangkauan dan pilar stabilisasi pasokan beras.

Selanjutnya terkait agenda Rapat hari ini dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2019.
 - a. Perkembangan komunitas beras PSO 3 tahun terakhir. Perum Bulog memiliki tugas untuk memperkuat pilar keterjangkauan dengan melakukan program perlindungan social keluarga penerima manfaat dalam bentuk program bantuan social beras sejahtera atau bansos sastra yang menggantikan program sebelumnya yaitu program subsidi pangan yang dikenal dengan raskin atau rastra pada tahun 2016. Penyaluran rastra tahun 2016 mencapai 3,1 juta ton beras, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 2,9 juta ton beras dikarenakan adanya program bantuan pangan non tunai atau BPNT. Selanjutnya pada tahun 2018 kebijakan penyaluran menjadi bantuan social atau bansos rastra yang hanya mencapai 1,2 juta ton, serta pada tahun 2019 hanya mencapai 354.824 ton di 295 Kabupaten untuk alokasi hingga September 2019.
 - b. Realisasi pengadaan dan penyaluran beras serta penyaluran CBP sampai dengan tanggal 19 Juni 2019 realisasi pengadaan beras dalam negeri mencapai 676.501 ton dengan penyaluran PSO melalui program bansos rastra sebesar 279.443 ton dan penggunaan CBP sebesar 227.456 ton. Terkait menggunakan CBP tambahan stok CBP sebesar 250.979 ton telah habis digunakan pada tanggal 12 Desember 2018, sehingga setelah tanggal tersebut Pemerintah meminjam stok Perum Bulog sebesar 67.837 ton, pada tahun 2018 dan tahun 2019 ini sebesar 227.456 ton sehingga total yang dipinjam oleh Pemerintah per-19 Juni 2019 sebanyak 295.282 ribu ton. Adapun anggaran PSO dalam APBN 2019 anggaran bansos rastra dikelola oleh Kementerian Sosial, sedangkan untuk CBP dikelola oleh Kementerian Keuangan. Saat ini draft peraturan Menteri Keuangan terkait CBP masih

dalam proses penyusunan yang direncanakan akan digunakan system penggantian selisih harga, sehingga rincian alokasi anggaran masih belum memiliki pengesahan draft isian pelaksanaan anggaran atau DIPA 2019 atas kegiatan tersebut. Sementara itu jumlah stok beras dikelola oleh Perum Bulog saat ini jumlah cukup besar yaitu mencapai 2,26 juta ton beras per-19 Juni 2019. Dengan jumlah stok terbesar dan tersebar diseluruh Indonesia, Bulog siap untuk melaksanakan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga sesuai dengan penugasan dari Pemerintah. Namun demikian besarnya jumlah stok beras yang ada tersebut membutuhkan kejelasan terhadap outlet penyaluran agar Bulog dapat terus melaksanakan penugasan penyerapan gabah atau beras Petani sesuai dengan Inpres nomor 5 2015 dengan baik.

Bapak, Ibu, Ketua, Wakil Ketua Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati.

Yang ke II RAPBN tahun 2020 Perum Bulog dalam penyusunan perhitungan APBN tahun 2020 Perum Bulog mengevaluasi kondisi operasional yang dihadapi terkait kebijakan Pemerintah yaitu keadaan jumlah stok beras yang melebihi jumlah CBP yang ditetapkan atau over stok, namun penugasan penyaluran justru dikurangi sehingga diperlukan outlet dan KPSH yang masif untuk keseimbangan pengadaan dan penyaluran penugasan penyerapan beras terutama di bulan Maret dan April 2019 dalam kondisi stok yang masih tinggi, sedangkan sebaiknya penugasan Bulog dirancang secara integrasi dari hulu ke hilir, serta penyimpanan stok yang besar berpotensi menurunkan mutu beras dan ningkatkan biaya pengolahan dan penyimpanan.

Selanjutnya untuk komoditas beras dengan asumsi perkiraan inflasi tahun 2020 mencapai 4%, HPP masih tetap sesuai dengan Inpres nomor 5 2015, serta biaya operasional dan lainnya disesuaikan dengan perkiraan inflasi. Perhitungan HPP yang diperoleh adalah sebesar Rp.10.734/kg, dengan HPP tersebut usulan anggaran untuk OCBP mencapai sebesar 2,64 triliun rupiah dikarenakan jumlah kuantum yang diusulkan adalah sebesar 1,2 juta ton yaitu 80% dari 1 setengah juta ton pengolahan CBP sesuai dengan rakertas tahun 2018. Serta untuk bencana alam sebesar 3,22 triliun rupiah dengan jumlah kuantum yang diusulkan sebanyak 300 ribu ton atau 20% dari stok CBP, dengan demikian jumlah anggaran yang diusulkan untuk komoditas beras mencapai 5,86 triliun. Adapun untuk komoditas selain beras kami mengusulkan anggaran untuk 4 komoditas yaitu jagung sebesar 348 miliar rupiah, kedelai sebesar 1,9 triliun rupiah, gula sebesar 3,89 triliun rupiah, serta daging kerbau 619 miliar rupiah sehingga total mencapai 6,75 triliun rupiah. Oleh karena itu total usulan anggaran Perum Bulog untuk tahun 2020 mencapai 12,61 triliun rupiah, terdiri atas anggaran beras 5,86 triliun rupiah dan non beras sebesar 6,75 triliun rupiah.

Selain itu kami mengusulkan volemu penugasan Bulog ditingkat untuk menyesuaikan dengan volemu pengadaan, serta mohon dukungan agar alokasi pada Kementerian Sosial sebesar 20,8 trilion rupiah dalam RAPBN 2019 yang diarahkan untuk program beras sejahtera dalam bentuk bantuan pangan non tunai agar dapat

mengakomodir kegiatan bansos astras sesuai dengan usulan Perum Bulog dalam nota keuangan RAPBN 2019 melalui mekanisme bansos rastra dan bukan BPNT. Kami juga mengusulkan agar pengelolaan komoditas beras dan cadangan pangan pokok agar dapat diakomodir dalam anggaran di Kementerian Lembaga terkait.

Bapak, Ibu, Pimpinan serta Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Yang ketiga kesiapan Bulog melayani BPNT.

Terkait BPNT dapat kami sampaikan bahwa peluang kebutuhan pasar BPNT untuk periode Juni, Desember 2019 mencapai 1 juta ton, yang terdiri atas BPNT exciting sebesar 718 ribu ton untuk 10,3 juta KPM atau rata-rata seratus tiga ribu ton perbulan dan perluasan BPNT sebesar 284 ribu ton. Adapun target Bulog untuk sisa penyaluran BPNT ditahun 2019 tersebut adalah sebesar 62% atau mencapai 620 ton, yang terdiri atas target BPTN setting sebesar 338 ribu ton dan perluasan BPNT sebesar 282 ribu ton. Adapun strategi yang akan dilakukan mencapai target BPNT tersebut adalah menetapkan struktur biaya yang rasional dan kompotitif dalam merebut pasar BPNT, melakukan pemetaan kebutuhan dalam negeri premium dan rencana pemenuhan kebutuhan untuk BPNT sebanyak 269.714 ton, memperluas jaringan BPK sebagai agen penyedia kebutuhan BPNT di 252 Kabupaten, mengoptimalkan produksi UPGB untuk mencangkup kebutuhan daerah sekitar, serta menerapkan aplikasi wainopcers untuk laporan realisasi penjualan dan menerapkan rework kepada agen kinerja penjualannya.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati,

Kami mengucapkan banyak terima kasih.

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh***

KETUA RAPAT:

Ada tambahan dari?
Cukup.

Selanjutnya kami berikan kesempatan tanggapan anggota Komisi IV.
Pertama-tama Ibu Agustina Liwujeng, kalau isi ini supaya ini dulu.
Saya persilakan Ibu yang cantik.

F-PDIP (AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI, S.S.):

Terima kasih Pak Ketua.

Yang saya hormati teman-teman dari Bulog dan jajarannya.

Tadi karena menunggu rapat muali kita sudah berbincang-bincang banyak dan diantaranya adalah mengenai peran Bulog dalam proses PLT, nah tetapi harus disahkan di dalam rapat ini. Dari saya sampaikan tadi yang kita bincang-bincangkan di ruang sebelah bahwa kita berharap beras yang digunakan untuk BPTN ini dikelola oleh Bulog secara maksimal, iya mengapa, karena ini berkaitan langsung dengan cadangan beras nasional atau cadangan pangan nasional, ketika Bulog itu memiliki stok dan jaringan yang cukup seluruh Indonesia ketika terjadi bencana akan langsung secara otomatis dapat membantu masyarakat yang terkena bencana untuk menyelesaikan masalah. Saya kira kita semua paham bahwa yang namanya bencana itu tidak hanya tanah longsong, gunung api meletus dan lain sebagainya, tetapi juga ketika pasar itu terjadi keresahan misalnya harga tinggi, maka perlu akan segera operasi pasar atau mungkin pasokan rendah sehingga masyarakat punya uang tapi tidak ada barang, tidak ada beras maka Bulog akan segera turun. Nah kalau stok itu banyak kemudian tidak ada bencana yang kita inginkan bersama Pak, maka Bulog ini harus ada solusi kemana ini stok. Untuk itulah solusi satu-satunya adalah memberikan peran yang lebih dari pada hari ini. Tadi kita lihat di dalam paparan bahwa stok Bulog hari ini dalam kategori sangat tinggi, kalau beras itu terlalu banyak berada di gudang, tentunya ya ada masa kadaluarsa, kalau banyak sekali beras engga dipakaikan, kan eman-eman sayang. Ada tadi disampaikan bahwa terjadi keresahan dalam masyarakat perdagangan beras bahwa kenapa kok kemudian akan dimonopoli oleh Bulog, guna menjawab untuk keresahan itu maka kami meminta Pemerintah untuk bisa memberikan peran Bulog ini jendernya itu jelas. Beberapa saat yang lalu Komisi IV sering sekali menyampaikan bahwa supaya Bulog ini dikembalikan kepada Lembaga menjadi Lembaga Nirlaba, bukan Lembaga yang disatu sisi menjaga ketahanan pangan, menjaga stok beras, menjaga harga pasar tapi disisi lain harus mendapatkan untung sehingga membingungkan. Mana ini peran Bulog ini, mana sebenarnya titik beratnya maka sekali lagi kami sampaikan di dalam sidang Komisi IV yang terhormat ini, supaya Bulog itu didkembalikan kepada Lembaga penjaga stok semata bukan sebagai Lembaga Bisnis yang harus berorientasi pada menghasilkan pendapatan untuk negara. Jika demikian maka kami berharap bahwa masyarakat pedangan beras itu dapat mengerti ketika proses perdagangan beras, stok beras ini dikembalikan kepada Bulog, jadi bukan semata-mata untuk mencari untung tetapi lebih besar pada kemanfaatan adalah menjaga ketersediaan pangan nasional.

Saya kira itu Pak Ketua, mudah-mudahan diakhir rapat Komisi kita nanti dapat dimasukkan ke dalam kesimpulan kembali, walaupun mungkin realisasinya entah kapan tapi kita tidak akan pernah lelah membuat Bulog ini sebagai Lembaga Pemerintah yang

terpandanglah, yang memiliki posisi yang penting. Yaa mungkin ada kemarin ada disampaikan ada Badan Pangan, ada apa, ada itu tetapi kita meminta ini yang ada hanya Bulog ini hari ini, maka kita bertumpu pada Bulog.

Demikian Pak terima kasih, waktu saya kembalikan.

KETUA RAPAT:

Makasih.

Selanjutnya saya persilakan Pak Hasanuddin dan siap-siap Ibu Endang.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN AS, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

**Pimpinan yang kami hormati,
Kawan-kawan Anggota Komisi IV yang berbahagia, Perum Bulog Pak Buwas dan
kawan-kawan yang hadir yang kami sayangi.**

Karena masih bulan Syawal izinkan kami mengucapkan *Minal 'Aidin Walfaidzin* Mohon Maaf Lahir Batin, Selamat Idul Fitri 1440 Hijriyah Mohon Maaf Lahir Batin, *Taqabbalallahu Minna Waminkum Taqobbal Ya Karim*

Ada beberapa hal yang sangat menarik pada siang hari ini,

Pertama Pemerintah menugaskan Bulog untuk menyerap gabah dari Petani, itu luar biasa mulianya tugas dari Bulog. Tetapi harga yang ditetapkan oleh Pemerintah sungguh tidak manusiawi dengan capaian yang dilakukan oleh kawan-kawan Petani karena begitu tingginya biaya produksi, kalau dibeli cuman 4 ribu gabah kering rasanya susah Bulog untuk membelinya. Apalagi kalau di Sumatera Barat, apalagi kalau di Kota Solo, di Solo itu Pak namanya kalau di Solo itu 4 ribu itu tidak mungkin, tidak mungkin, 7-8 ribu baru bisa, karena saya pernah sidak ke gudang Solo ya tidak ada beras, ya bagaimana mau ada kalau 4 ribu siapa yang mau jual ke Bulog, engga mungkin itu tidak mungkin. Oleh karena itu harus diperbaiki harga yang ditetapkan oleh Pemerintah atau begini, jangan harga ditetapkan satu luas Indonesia ini sekian ribu hektar harga 1 jangan, bisa saya di Jawa harga 4 ribu umpama, di Sumatera harga 7 ribu, di Kota Solo harga 8 ribu kan bisa bervariasi, karena tingkat produksinya juga berbeda-beda dan juga kesuburan tanah juga berbeda-beda. Pertanian inikan tidak terlepas dari 4 unsur;

1. Pertama adalah unsur kebaikan lahan, kalau lahan unsur haranya sudah rusak akibat pemakaian kimia yang terlalu berlebihan maka produksi tidak akan pernah bertambah, oleh karena itu harus diperbaiki lahannya dengan cara

mengurangi pupuk yang selalu memakai kimia diganti dengan organik, itu cara petama untuk mengubah lahan.

2. Yang kedua tidak terlepas dari Bibit, kalau bibit sembarangan tidak akan pernah tercapai apa yang diinginkan oleh Pemerintah. Rata-rata panen kita perhektar sekarang 4-5 ton, tapi kalau kita pakai bibit yang baik, unggulannya yang memang cukup handal itu bisa 10 ton, bahkan sudah bisa 14 ton Pak perhektar, berartikan perlu kordinasi dengan Kementerian Pertanian supaya hasil gabah kita jangan terlalu rendah.
3. Yang ketiga tidak terlepas dari infrastruktur, bagaimana hebatnya benih, bagaimananya pun hebatnya lahan kalau tidak dialiri dengan air dia juga tidak akan maksimal. Oleh karena itu infrastruktur terhadap Pertanian ini juga perlu kita bersama-sama perbaiki.
4. Yang keempat yang terakhir pemasara, alhamdulillah pada kesempatan ini Bulog bisa menyerap Gabah dari Pertani tetapi kendalanya itu lagi harga harus diperbaiki.

Pimpinan yang berbahagia, Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati.

Itu mengenai Padi atau Gabah Padi.

Tidak terlepas juga bahwa kita dihebohkan oleh Kedele, bahwa Kedele yang ada Nusantara yang tercinta Gemah Ripa Rojinawi ini kecil sekali. Tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Buas ternyata Kedele prodak Indonesia ini luar biasa bagusya, kenapa itu tidak juga lirik, kalau bisa Bulog dengan Kementerian Pertanian lirik itu supaya tidak terlalu banyak impor dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Ada beberapa hal yang pernah disampaikan oleh Pak Buas dimedia bahwa kordinasi antar kelembagaan kurang harmonis, oleh karena itu pada kesempatan ini kami ingin juga mendapatkan info yang terbaru dari Pak Buas, bagaimana kordinasi dengan Kementerian Sosial terhadap bantuan non tunai kepada masyarakat, kalau ini bisa dikordinasikan dengan baik stok yang ada 2,6 juta yang sekarang ada di gudang Bulog dalam semester berikut ini saya rasa bisa tersalur dengan baik, tapi kalau tidak tentu stok itu akan menjadi barang yang rusak, akibatnya tentu kerugian dialami oleh Perum Bulog.

Tadi rekan kami menyampaikan bahwa bagaimana kalau Bulog dikembalikan saja kepada aturan semula, kalau saya berbeda malah pandangannya, ini mohon maaf tidak apa-apa karena kita juga berbeda. Kalau saya memberikan rekomendasi pada kesempatan ini ya sudahlah Bulog ini dikembali, eh bukan dikembalikan, bagaimana fungsi Bulog ini betul-betul menjadi profit oriented saja sudah. Pak Buas dengan kawan-kawan coba kita berpikir yang jernih bahwa mafia terhadap beras ini tidak akan bisa secapatnya kita kembalikan, karena pasarnya bebas. Oleh karena itu mampu tidak Bulog bersaing dengan mereka, kalau Bulog mampu bersaing dengan mereka secara

kualitas, secara harga ya kenapa tidak. Apalagi Bulog gudang-gudangnya sudah sampai kepada ke Pedesaan, ke Kecamatan ada gudang-gudang Bulog. Oleh karena itu mari kita diskusi pada kesempatan ini, apakah mungkin kalau Bulog perannya kita sama kan dengan BUMN yang lain.

Mohon diberikan penjelasan kepada kami rencana Bulog, ini mohon maaf ini sudah terlambat sebetulnya, berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan terhadap rakertas yang pernah dilakukan oleh Perum Bulog bersama-sama dengan Kementerian Pertanian dan Menko Perekonomian terhadap impor salah satu komoditas kita. Tidak apa-apa kalau ini terlambat supaya jangan sampai terulang kembali, wabil khusus dengan bawang putih apakah sampai saat ini masih bisa diulang kembali supaya keputusan rapat itu bisa diterjemahkan oleh Kementerian Perdagangan bersama-sama dengan Bulog, kalau saya tidak salah 100.000 ton bawang putih yang dapat izin impot oleh Perum Bulog. Kami mohon juga disampaikan apa kendala sebetulnya yang dihadapi oleh Bulog, karena sampai saat ini kami masih mendengar bahwa itu belum ada realisasi dari keputusan rapat tersebut.

Kembali kepada BPNT tentu kita bersama-sama di Komisi IV ini walaupun itu terkait dengan Komisi berbeda, Komisi VIII kalau saya tidak salah, apa salahnya nanti melalui Pimpinan kita coba nanti berkordinasi dengan kawan-kawan di Komisi VIII, kita berharap Kementerian Sosial yasudahlah berikan saja kepada Bulog yang sama-sama diperintah oleh Negara. Kalau itu bisa selesai apa yang dilakukan oleh Bulog menyerap gabah dari Petani dan memberikan solusi dengan memberikan bantuan tunai kepada penerima, cadangan yang ada sekarang tentu akan berkurang walaupun tidak bisa selesai pada semester ini tetapi akan mengurangi cadangan yang ada sekarang.

Itu saja yang bisa kami coba lontarkan pada kesempatan ini.

Sekali dengan membaca apa yang ditulis oleh Bulog kami berikan apresiasi dan mudah-mudahan kedepan Bulog semakin jaya.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam

Sebelum Bu Endang barang kali saya ingin mengingatkan lagi bahwa nanti setelah menerima penjelasan KKP ini, kemudian nanti kita ada pendalaman, RKP dengan RKL, karena nanti hasil RKP ini akan masuk dinota keuangan Pemerintah yang dibaca Presiden. Karena itu kita berbicara masalah isu-isu strategis yang bisa masuk dalam nota keuangan nanti, soal-soal teknis nanti kita bicarakan dalam pendalam

sehingga kita menyusun kesimpulan juga tidak ada kesimpulan dari hasil penjelasan penerimaan dan ada kesimpulan dari hasil pendalamannya.

Itu saja mungkin saya hanya menyampaikan itu.

Selanjutnya saya persilakan Ibu Endang untuk menyapaikan.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pak Dirut dan jajaran,
Pimpinan, dan Kawan-kawan Komisi IV yang saya muliakan.**

Saya Endang Srikarti Handayani dari Fraksi Golkar. Tentunya saya mengapresiasi juga atas kinerja Pak Dirut dan jajarannya selama setahun, diangkatnya April tanggal 27 2018 kalau engga salah, karena saya juga WA memberikan selamat, apa nanti semoga bisa jaya tuh Bulog. Setahun dalam setahun ini tentunya tidak mudah untuk cuci piring di Bulog, karena banyak sekali mafia-mafia baik juga dari di dalam, baik juga di luar. Ini yang mesti harus banyak sekali energy yang mesti keluar, sehingga saya tadi lihat anggaran sudah disampaikan, mohon dukungan. Tentunya saya atas nama juga pribadi dan atas nama Fraksi, kalau diruang seperti inikan juga pastinya atas nama Fraksi Pak Pimpinan. Kalau itu positif Fraksi Golkar dong, dari Fraksi Golkar yang selalu dihati rakyat. Tentunya wajib mendukung karena ini yang diharapkan masyarakat atau rakyat dan ini marwah Negara kalau gol Bulog ini.

Cuman pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk melaksanakan, menjalankan penugasan Bulog ini secara baik dan benar, dan tentunya tidak bisa sendiri, harus banyak dukungan, dorongan, dukungan dan betul-betul positif karena inikan marwah Negara Bulog ini, menjadikan harapan rakyat, kesejahteraan rakyat ada di Bulog sebetulnya, ketahanan Pangan itu ada di Bulog, tetapi jalan sendiri, mati tidak mau, hidup segan, ini yang saya lihat, harus duduk bersama secara positif bagaimana caranya bisa barang ini bagus gitu loh. Kalau mengenai dukungan untuk anggaran, kami sebagai Partai Golkar satu-satunya mendukung karena ini untuk kesejahteraan rakyat.

Yang kedua ini tentang target Pak Dirut, Bulog ini akan punya target apa kedepannya. Kalau tetap seperti ini Pak Pimpinan, tidak mudah. Harus jelas, gitu. Terus yang terakhir saya tidak usah terlalu banyak karena sudah terintergrasi tadi. Ada yang menyalahi aturan sebagai tikus di dalam internal terus sekarang sudah ditangkap, tolong jelaskan dan harus betul-betul menjad tobatnya di dalam intern. Iya banyak sekali disana, mestinya dukungan itu harus tidak hanya dari luar tapi di dalam pun juga harus dukungan, makanya saya setuju sekali yang namanya bongkar pasang mencari yang terbaik dari yang baik. Yang terakhir lagi dua koma sekian enam ribu ton, ya itu ada batas waktu turun mutu, itu mau dikemanakan tolong jelaskan. Jangan sampai

nanti Kemensos berduet memberikan peluang yang 10 kilo bantuan tunai itu dikembalikan, seumpamanya berandai-andai positif ini, itu memberikan beras yang tidak bermutu lagi karena tidak bisa untuk menyalurka. Saya dengan mau diekspor karena bingungnya, karena bingungnya, nah inikan otomatis kan nanti menjadi busuk, saya sudah dengar busuk dimana-mana tapi yang belum busuk ini 2,6 ribu juta ton ini harus diselamatkan cepat untuk diselamatkan.

Demikian saja dari saya, terima kasih Pimpinan dan Pak Dirut beserta jajarannya.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Ibu Endang.

Beliau sayangnya tidak terpilih kemarin ya, saya mau calonkan, oh belum, tadi sudah terima kasih jadi saya terima kasih juga. Belum ya, belum yaa, hayo teruskan-teruskan. Yang belum selesai yang, oh belum. Ya tadi saya mau calonkan jadi Direksi Bulog, karena pengetahuan Bulognya luar biasa, kaget juga saya Pak.

Selanjutnya kami persilakan Pak I Made Urip, selanjutnya nanti siap-siap Pak Ibnu.

F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Dirut Perum Bulog beserta Direksi yang hadir, dan juga rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati.

Tadi telah disampaikan usulan anggaran ditahun 2020 di Perum Bulog yang hampir anggarannya diusulan itu (suara kurang jelas). Pada prinsipnya kita Komisi IV pasti akan memberikan support dan dukungan kepada Dirut Perum Bulog ini.

Nah sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Perum Bulog, ya memang sekarang inikan Perum Bulog beda dengan yang dulu, dulu LPND (Lembaga Pemerintah Non Departemen), sekarang itu menjadi Perum, Perum itu punya 2 tugas fungsi public dan komersial. Jadi kalau kita amati dan kita baca sering Pak Dirut menyampaikan di Media hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pangan kita bahwa perdagangan kita ini dikuasi kartel itu hampir 10% lebih, Bulog itu hanya sekitar 6-7 persen. Nah sekarangkan Bulog punya peran fungsi komersial itu, nah itu saya rasa fungsi komersial ini perlu dimaksimalkan oleh teman-teman di Bulog, terutama bagaimana menyerap produksi kita di dalam Negeri ini. Misalnya contoh bawang merah, bawang merah misalnya barang kali Perum Bulog bisa melakukan hal-hal yang strategis seperti ini gitu, sehingga kita tidak terlalu banyak importasi misalnya, sehingga harga bawang itu bisa terdongkrak tidak jatuh misalnya begitu. Nah jadi fungsi

komersial ini harus betul-betul dihidupkan oleh Perum Bulog karena amanat Undang-Undang inikan. Nah jadi kalau fungsi publiknya barang kali saya terus terang saja kalau dulu boleh diberikan tugas untuk melakukan raskin misalnya, itu sebenarnya sudah benar sekali itu. Nah sekarang beras yang ada di gudang-dugang pada saat sekarang inikan sirkulasinya agak lambat akhirnya karena penyaluran tidak ada, itu disuruh melakukan penyerapan berlebihan besar-besar kepada para Petani kita ini. Barang kali ini perlu kita lihat di dalam Undang-Undang Pangan kita, kita menyampaikan kepada Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang tentang Pangan itu. Di dalam Undang-Undang Pangan itukan sudah dijelaskan bahwa Pemerintah harus segera membentuk badan otoritas pangan nasional, mungkin Bulog salah satu intusinya misalnya diperkuat dengan ini.

Nah barang kali itu usulan-usulan yang ingin kita sampaikan pertama tentang peranan dari pada fungsi komersial itu betul-betul harus dihidupkan oleh teman-teman di Bulog ini.

Nah yang kedua,

Banyak sekali kita melihat di daerah-daerah UPGB yang telah dibangun terdahulu itu ada yang sudah haider artinya bahwa kadang-kadang itu letaknya sudah ditengah Kota dan juga di lingkungan penduduk. Dulu tidak ada, mungkin masih hamparan sawah yang begitu besar misalnya, sekarang sudah tercecak dia. Salah satu contoh misalnya di Kabupaten saya Tabanas Kediri itu tidak berfungsi UPGB Bapak itu dan makanya itu barang kali perlu dilakukan oleh pitaliasasi oleh teman-teman yang ada di Bulog ini dihidupkan mungkin dibawah kemana, mungkin dibawa kemang, dialokasi misalnya iya. Nah ini supaya betul-betul bermanfaat dia untuk melakukan penyerapan gabah itu sehingga hidup dia.

Nah tadi yang ketiga Pak Dirut menyampaikan usulan yang berkaitan dengan kedelai, jadi anggarannya itu cukup banyak itu. Memang kita sadari betul kita masih impor yang begitu tinggi, karena produksi tidak mencukupi, kebutuhan kita kalau tidak salah itu hampir 2,3 juta ton, sedangkan produksi dalam Negeri kita itu 900 ribu ton, jadi berapa get yang terjadi itu. Kita di Komisi IV ini dari dulu berusaha untuk memberikan dorongan support kepada Kementerian Pertanian supaya betul-betul kedele ini produksinya ditingkatkan, ternyata tidak ningkat-ningkat dia itu. Karena pernah dicobakan kita berikan anggaran yang begitu besar kepada Kementerian Pertanian belum juga bisa, karena para Petani kita begitu nanam kedelai panen harganya anjlok, nah jadi importasi kedelai masuk. Nah ini barang kali perlu dicarikan celah-celah ini, barang kali nanti mungkin Perum Bulog bisa punya Petani binaan misalnya untuk supaya betul-betul kedelai ini di dorong supaya produksinya meningkat dari 900 ribu pertahun bisa meningkat menjadi ya mendekati kebutuhan di dalam Negeri kita.

Nah barang kali itu Pak Pimpinan, Pak Dokter Hermato yang saya hormati.

Mudah-mudahan nanti menjadi Ketua Komisi yang akan datang ini dan terima kasih.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Terima kasih Pak Made Urip, Dokter Made Urip, sebentar lagi Profesor, insyaallah calon Gubernur Bali, kita do'akan semoga sukses.

Demikian tadi Pak Dirut padangan dari Pak Made Urip dari Fraksi PDI Perjuangan, berikutnya Pak Ibnu Multazam dari Fraksi PKB, dan siap-siap Pak Ono. Silakan Pak Ibnu.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pak Dirut Bulog yang saya hormati.

Pimpinan yang nanti sebentar lagi do'a Pak Made menjadi Ketua Definitif, Pimpinan Definitif Komisi IV.

Pertama saya ingin penjelasan tentang pinjaman beras CBP Pemerintah sebesar 295.285 ton, apakah nanti dikembalikan dalam bentuk beras atau pinjaman ini dikembalikan dalam bentuk uang. Kalau uang skemanya bagaimana, apakah harga ketika CBP ini dikeluarkan oleh Bulog artinya pada saat pinjam 2018 atukah ini ada komitmen-komitmen misalnya komitmen tertentu yang akan dibayarkan oleh Pemerintah ke Bulog.

Yang kedua saya ingin walaupun transisi dari beras raskin ke BMPT itu keduanya kan kebijakan Pemerintah, kan Pak Buas selaku Dirut Perum Bulog kan hanya melaksanakan penugasan. Nah ini bagaimana kalau dikasih suplayer ke kios-kios yang menjual BMPT itu direbut oleh Bulog. Konon ceritanya kalau BMPT inikan beras Premium, betul Pak Buas itu menjual beras premium. Nah dengan disediakan BMPT kepada masyarakat transisi itu bad nyus is a good nyus lah kita-kita, karena toh Bulog ini mempunyai tugas komersial disamping bukas BSO, nah ini supaya bisa direbut disamping tugas-tugas komersial yang lain. Saya kemarin menyampaikan beberapa pandangan dengan melalui tugas komersial Bulog menjual beras saset saya kira itu sudah luar biasa dan respon dari masyarakat ini juga luar biasa khususnya di daerah-daerah perguruan tinggi yang banyak mahasiswa kost, saya kira itu perlu dilanjutkan Pak. Selanjutnya untuk tugas komersial itu barang kali sudah dilakukan apa namanya, pendekan apa belum dengan BUMN-BUMN, BUMN itukan mempunyai anak-anak perusahaan misalnya perhotelan itukan banyak sekali, itukan merupakan captive market kalau bisa Bulog bekerjasama untuk menjual beras premium ke jaringan BUMN.

Yang ketiga saya kira kios-kios Bulog yang menjual beras ke masyarakat yang premium, jadi kios-kios Bulog itu yang menjual beras masyarakat kepada masyarakat yang premium. Jadi saya kira bad nyus is a good nyus mulai sekarang sudah saatnya Bulog itu infiltrasi untuk ke pasar-pasar komersial, ya siapa tau nanti ini pasar komersial itu berhasil dibangun oleh Bulog, sedangkan yang PSO dikembalikan, nah inikan menjadi dua sayap, dua mata pisau yang sama-sama tajam dilain pihak itu Bulog juga main di Pasar komersial, disisi lain dia main di PSO.

Yang terakhir usulan Bulog tahun anggaran 2020 inikan alokasinyakan enam trilliun tujuh ratus miliar itu untuk rencana pengadaan jagung, kedelai, gula dan daging. Saya mengikatkan Pak Buas jangan ini hanya untuk impor, misalnyakan jagung ini skema impor ini, padahal dalam negeri itu stok jagung yang tahun 2018 kemarin katanya Pak Mentan, ini data dari Kementerian Pertanian berkat dorongan Komisi IV itukan cukup. Nah ini rencana tahun 2020 inikan untuk impor jagung, nah ini supaya ditinjau kembali, ya tidak semua impor tetapi juga untuk pengadaan dalam negeri. Termasuk juga kedelai, kalau kedelai mungkin masih banyak impor engga masalah. Gula, gula inikan kemarinkan Gula dalam negeri sajakan tidak bisa jual nih, nah disini perencanaanya hanya semuanya untuk impor. Nah ini barang kali untuk membeli gula-gula yang tidak bisa terjual di dalam negeri. Daging khususnya ini tidak ada impor untuk perencanaannya tidak ada impor cuman, storiesdnya lemah ... ada apa tidak, kalau tidak ada tentunya ini akan kebebanaan biaya sewa lagi.

Terima kasih Pak Buas, mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Selanjutnya kita persilakan Pak Ono Surono dari Fraksi PDI Perjuangan, dan siap-siap Bapak Fadholi.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Terima kasih Pak Hermanto.

Yang saya hormati Pak Buas beserta seluruh jajarannya.

Saya menyikapi apa yang tadi sudah disampaikan Bapak terkait dengan kondisi Perum Bulog yang menurut saya sampai dengan saat ini dari sisi kelembagaanya pun kita belum mempunyai sebuah kepastian, Bulog senyatanya lebih focus ke fungsi

mana. Tapi apabila tadi disampaikan bahwa Bulog mempunyai 3 pilar, pilar ketersediaan, pilar keterjangkauan, pilar stabilitas, berarti kita kembali Bulog sebagai lembaga yang memang pada saat dibentuk pertama kali fungsinya bukan mengarah ke komersil, tapi bagaimana Petani misalnya bisa mendapatkan keuntungannya yang layak, konsumen juga bisa membeli harga pangan dengan harga yang wajar, kan begitu.

Disisi lain misalnya tadi ada isunya terkait dengan cartel-cartel yang banyak opini yang berkembang bahwa keuntungan dari jalur distribusi itu lebih mayoritas dinikmati oleh swasta, Menteri Pertanian pernah menyampaikan hampir 300 triliun pertahunnya dari jalur distribusi itu dan kita memang terlihat begitu jelas. Pemain ayam cuman 4 perusahaan, beras yakan kurang dari 10 perusahaan, gula dan kita melihat secara jelas kondisi itu. Nah sehingga dengan kondisi dari sisi kelembagaan dan regulasi pun menurut saya ini juga belum secara total dilaksanakan, seperti misalnya amanat Undang-Undang 18 2012 terkait dengan Badan Pangan Nasional yang diawal rumusannya bahwa Bulog yang nanti akan menjadi Badan Pangan Nasional, terus ada juga isu bahwa regulator dan operator ini harus dipisahkan, ya sampai sekarang juga belum dibentuk pada akhirnya.

Nah sehingga Pak Buas terhadap kondisi-kondisi yang saat ini terjadi dan berkembang saya si berpikir bahwa hal yang mendasarnya harus selesai dulu, sehingga tidak akan terjadi lagi. Pada saat Mentan mengatakan produksinya bagus, Kementerian Perdagangan stoknya tidak ada harus impor dan Pak Buas juga harus kewalahan juga karena gudangnya tidak cukup untuk menampung beras impor tersebut, nah sehingga ke depan ya tidak harus terjadi dagelan-dagelan seperti itu. Nah sehingga saya berpikir bahwa apa yang diusulkan Pak Buas yang dimateri yang saya terima, ini harus benar-benar di detailkan Pak. Yang pertama yang terkait dengan Volume penyaluran, yang disisi lain tadi Pak Buas menyampaikan Pemerintah melakukan kebijakan pengurangan dengan berbagai macam tadi perubahan-perubahan kebijakan dari Beras Sejahtera menjadi bantuan pangan non tunai dan ini memang mungkin berawal juga dari kondisi-kondisi dimana saat dulu Bulog tidak bisa menghadirkan beras dengan kualitas yang bagus misalnya, yang pada akhirnya rakyat pun protes dan akhirnya Pemerintah pun memberi kesempatan atau keluasaan bagi rakyat untuk membeli beras dengan kualitas yang lebih baik sehingga uang yang harus diberikan. Tapi pada saat sisi itu pun sebenarnya Bulog bisa mengambil iya, bantuan pangan non tunai itu stoknya misalnya dari Bulog semua misalnya, dan kalau pun ini menjadi sebuah kemampuan ya wajib kita dukung kita dorong. Nah terus terkait dengan usulan-usulan yang di Bulog ini mungkin dari sisi penyaluran penugasan itu apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah yang mungkin bisa kita dorong melalui rekomendasi atau pun hasil kesimpulan rapat kita nanti, sehingga paling tidak pada saat kita bicara dengan Kementerian Pertanian, apa yang harus Kementerian Pertanian lakukan untuk bisa mendukung Bulog, bukan hanya pada saat Petani yang berasnya tidak dibeli oleh para bakul-bakul dengan kualitas yang rendah akhirnya Bulog yang menjadi korban gitu, tapi ada back up juga dari Kementerian Pertanian. Kementerian Perdagangan pun sama, tapi kadang kala pada saat kita bicara atau melakukan rapat

gabungan dengan Komisi ini juga Kementerian Perdagangan agaknya kurang respon apa yang disampaikan oleh Komisi IV. Nah sehingga menurut saya perlu lebih detail lagi Pak terkait dengan usulan Bulog-Bulog ini, apa yang harus kita dorong yang akan menjadi kesimpulan. Dan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Bulog dalam hal menyerap gabah Petani, kemarin juga saya sudah dibantu banyak khususnya di Cirebon, kebetulan kemarin panen raya dan mungkin ada sebagian yang belum terserap sehingga harga gabah jatuh ke 3.400, ya akhirnya Bulog juga yang menyerap itu. Dan disaatnya misalnya kondisi HPP Gabah yang 4.070 ya Pak, iya kan harga kering Petani, Petani pun ya masih menganggap harga itu terlalu rendah, harga itu terlalu rendah, tapi pada saat dibeli Bulog pun Bulog belum bisa menghasilkan produk beras yang bisa bersaing dengan pasar internasional kan, sehingga inikan harus dicari juga apa sebenarnya yang harus dilakukan Pemerintah, Petaninya senang Bulognya juga bisa bersaing, kan begitu Pak.

Nah jadi mungkin sekali lagi ini PR kita bersama dan mudah-mudahan di periode ke-2 Pak Jokowi ini benar-benar sudah akan merumuskan menemukan format yang ideal, Bulog akan bergerak difungsi yang mana. Tapi sekali lagi bahwa Bulog sebagai BUMN ini merupakan pilar ekonomi negara yang menurut saya ya menjadi kunci, iya kan menjadi kunci untuk bisa bagaimana kita mencapai segala tantangan di Indonesia.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Ono.

Selanjutnya Pak Fadholi terakhir.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

**Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Yang saya hormati juga,
Yang terhormat Bapak Buwas yang baik hati dan tidak buas lagi, beserta seluruh jajarannya yang sangat luar bisa.**

Memahami peran ganda yang saat sekarang ini dilaksanakan oleh Bulog, ini kalau orang Jawa itu mengatakan (ewoh ing pang budi), jadi memang serba salah ini. Pada sisi lain peran diharapkan peran Bulog itu untuk bisa menjadi penyangga pangan secara nasional, tapi pada sisi lain Bulog tidak boleh rugi, karena memerankan sebagai

satu BUMN yang dituntut untuk bisa ada profit. Ini memang tidak gampang, sehingga karena peran ganda itulah mungkin engga bisa kita akan jalan dua kaki dan semuanya bisa terlampauai pada sisi lain.

Nah oleh karena itu, tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Pak Ono. Ini mumpung pada awal menjelang periode ke-2 Bapak Presiden Jokowi ini, diharapkan ada suatu pemikiran-pemikiran jauh kedepan, bila mana perlu dituangkan dalam satu program jangka panjang, bagaimana Bulog ini akan bisa mengfungsikan. Kalau itu memang, kalau itu masih ada beban untuk mencari profit, saya pikir itu tidak akan pernah mampu, engga bisa dilakukan, engga bisa. Tetapi ini perlu dirumuskan dan dulu kita pernah sepakat bahwa kita akan mengadakan FID, tetapi tidak pernah kunjung datang. Untuk bisa menelaah dan mengupas tuntas apa yang akan dilakukan dan apa idealnya Bulog untuk kedepan. Ini perlu diberikan suatu masuk kepada Pak Presiden, agar nama Bulog bisa kembali bergaung, masih ingat jamannya Pak Bustanul Hanifi dan lain sebagainya itu.

Nah oleh karena itu kalau untuk apa yang disampaikan disini yang kaittannya dengan masalah pengajuan anggaran dan lain sebagainya, secara prinsip bahwa kami selaku Komisi IV sangat mendukung, tidak ada masalah. Hanya persoalannya kalau ini tidak ada lompatan maka Bulog akan stack, nah seperti ini. Seperti apa yang dikatakan Mbak Endang “mati tak mau, hidup segan mati tak mau” atau bagaimana itu, sehingga ya semacam ini terus. Dan pada sisi-sisi tertentu Bulog akan dibuly, ketika ada masalah-masalah yang kritis Bulog akan dibuly, bagaimana peran Bulog, bagaimana peran Bulog, ini sangat tidak bagus sekali. Maka dengan kebiawan Pak Buas yang selama ini sudah terkenal bisa mengatasi beberapa persoalan, baik narkoba dan lain sebagainya sekarang sampai disini, saya pikir harus berani menuangkan suatu gagasan yang memang ini diperlukan kedepan. Pilih salah satu antara profit atau penyangga pangan nasional, ini harus berani mengambil satu pilihan. Nah oleh karena itu perlu dituangkan beberapa gagasan-gagasan, apa konsep Bulog terhadap ketahanan pangan nasional kita. Kalau dengan program yang sekarang dilaksanakan ini tidak akan pernah ada konsep untuk itu, ya adanya nanti mentok-mentok gitu. Salah satu contoh ketika nanti harus menampung beras Petani kemudian harganya engga berani beli karean rugi, mandek lagi itu, jadi kaya gitu. Nah apa yang menjadi program Bulog untuk bisa penataan dan penyangga pangan nasional.

Dan yang kedua juga secara real, bagaimana wujud keberpihakan Bulog terhadap Petani kita dan juga kepada Peternak, ya apa pun ini alamatnya selalu ke Bulog karena dianggapnya bahwa yang akan mampu untuk bisa ikut mengstabilkan harga dan menganggat dan memberikan tambahan penghasilan bagi Petani itu adalah Bulog anggapnyakan semacam itu, karena yang punya hak untuk bisa membeli dan berikan suatu kewenangan untuk bisa membeli dan menjual itu adalah Bulog, nah persoalannya semacam ini dan ini perlu disiasatti dengan baik. Salah satu contoh misalkan yang selama ini sudah sering kita sampaikan bahwa Petani tidak akan mungkin untuk bisa membuat penghargaan gabah, maka ketika musim hujan Bulog

tidak akan mampu untuk bisa membeli beras dengan kadar air yang 14, karena Pertanian tidak akan mungkin bisa mengeringkan. Nah apakah Bulog siap apa tidak untuk bisa membeli pengeringan-pengeringan dan itu didirikan di beberapa sentra-sentra sehingga Bulog membeli dalam wujud gabah, ini akan membantu Petani dan untuk penyangga ini kita harus berani berapapun anggaran kalau itu bisa digunakan untuk kepentingan ketahanan pangan kita, saya pikir itu masih bisa toleransi dan masih bisa kita pertimbangkan bersama-sama. Besar memang anggaran yang diperlukan, tetapi kalau itu tidak melangkah ya kita akan mangguk-mangguk tidak akan bisa sampai pada tujuannya.

Nah ini keberpihakan dua hal, satu sisi adalah keberbaikan kepada Petani maupun Peternak ini juga kaitannya dengan Bulog, pada sisi lain adalah berperan untuk bisa mewujudkan ketahanan pangan nasional. Persoalan kemudian harus berkordinasi dengan seluruh jajaran yang terkait itu adalah sudah hal yang pasti, bukan sekedar dengan Menteri Pertanian atau Perdagangan, bahkan juga kepada Kepala Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi untuk bisa mewujudkan bagaimana ada sentra-sentra yang kemudian kerja Bulog disitu untuk bisa membuat gudang menimbun gabah kemudian sekaligus bisa membuat pengeringan, itu baru dari si stok Padi saja, belum untuk bisa menampung daging dan lain sebagainya, belum juga jagung, belum juga kedelai. Maka ibarat orang Indian itu, banyak sekali yang akan kita gagas dan yang kita laksanakan tapi sementara kita belum bisa jalan dengan lari kencang, melakunya masih dimi-dimi-dimi kan engga nyampe-nyampe kan gitu, maka harus berani melakukan suatu itu.

Nah apa yang sudah dituangkan disini pada prinsipnya karena ini adalah penanganan satu tahunan, pikir ini si semuanya kita oke, ya saya setuju pada prinsipnya apa dan ini sangat bagus memberikan satu apresiasi ini, tapi tolong mohon bisa digagas. Ini saatnya mumpung Pak Buas ada di Bulog, pada saatnya sekarang Pak Buas harus berani membuat satu lompatan dan menyampaikan suatu ide-ide, bahkan bila mana perlu sampaikan dan harus itu sampaikan kepada Pak Presiden. Kalau kita tidak melakukan perubahan dalam proses kerja Bulog ini, maka kita akan stuck semacam ini terus. Saya pikir itu penting. Nah untuk itu agar sebagai suatu penguat maka gagasan itu perlu dituangkan dalam suatu konsep yang bagus, blueprint yang bagus kemudian nanti bisa kita bahas bersama-sama dengan Komisi IV ini untuk bisa dilakukan FID secara rinci, sehingga kita buka kalau persoalan menangani gabah semacam ini, persoalan menangani jagung semacam ini, persoalan menangani daging, kemudian untuk bisa mengatasi masa paceklik kita harus semacam ini, yang diperlukan gudangnya berapa, yang diperlukan jadi agar bisa menyimpan tanpa ada bau yang karena sekarang inikan sayang beras itu disemprat semprot dengan, ini ya kelihatannya semacam itu kan ini tetap ada reaksi, jadi biar engga apa namanya, kena penyakit apa itu, jamur macam-macam semprot lagi, nanti dalam waktu berapa minggu lagi disemprot lagi, kalau itu semprat-semprat semprat-semprat kan bisa berbahaya Pak akan gudang itu. Nah disamping secara internal masalah mekanisme penataan di wilayah, dilingkungan internal Bulog itu sendiri memang perlu ada suatu penanganan

yang secara serius dan itu nanti bisa dibuka ditambahi FID juga. Sebetulnya kalau kita buka ini memang banyak sekali persoalan-persoalan internal yang memang harus diselesaikan.

Salah satu contoh misalnyakan saya ada di gudang Bali, di gudang Bali satu gudang itu yang mengurusinya cuman satu orang, cuman satu orang saja yang nyatet ya satu orang itu engga ada karyawan lain, engga ada Pak cuman sendirian itu ada di gudang, ada yang kemarin macet pada itu. Nah kalau ini terjadi semacam ini, mana bahkan saya dengar-dengar bahwa rencananya gudang itu mau akan disewakan karena tidak lagi efektif untuk itu, nah hal-hal yang semacam itu memang internal dari pada Bulog, tetapi penataan secara internal ini memang perlu.

Nah prinsipnya menurut saya ini sebagai suatu masukan yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi saya akan respon dengan baik, bahkan termasuk operasi kami juga siap untuk bisa merespon apa yang akan dituangkan gagasan kedepan ada perubahan yang lebih baik bagi Bulog ini untuk bisa menuju pada ketahanan pangan kita dan penyangga pangan kita secara nasional.

Demikian yang saya sampaikan, atas segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Akhirul Kalam

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakaatuh

Saya kira ini Pak Fadholi terakhir dari anggota, kami persilakan Pimpinan, cukup, *alhamdulillah*, biasanya Pak Rahmat ini sebagai pelopor, tapi hari cukup, jadi sudah pantas jadi Pimpinan Komisi nanti ya.

Demikian tanggapan dari Anggota Komisi IV DPR RI.

Selanjutnya kami persilakan kepada saudara Direktur Utama Perum Bulog untuk bisa menjawabnya.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak Ketua.

Bapak Ibu sekalian yang kami hormati.

Kami akan mencoba menjawab dari beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian.

Yang pertama dari Ibu Agustina, kami terima kasih Bu atas dukungan dan saran Ibu memang itu yang kita perlukan sampai saat ini, jadi apa yang Ibu sampaikan memang itulah permasalahan yang ada di kita dan memang kita berharap justru dorongan dukungan dari Bapak Ibu sekalian supaya kedepan Bulog justru perannya memang betul-betul seperti yang diharapkan oleh Negara Bangsa dan Masyarakat ini.

Pak Hasanuddin, jadi memang persoalan penyerapan Bulog ini memang buah simalakama Pak salah satunya adalah dari HPP tadi Pak, kita tidak bisa menyerap kecuali kemarin Pak yang dari Ceribon tadi disampaikan bahwa pas ada musibah Pak, musibah buat Petani gitu Pak, kita bisa menyerap banyak Pak karena memang harganya turun Pak tapi kita juga harus berpihak kepada Petani. Artinya, bukan berarti dengan 3.700, kita membeli 3.700 Pak tapi sesuai dengan HPP kita 4.070 supaya Petan diuntungkan disini Pak, karena kan kita juga peran kita jangan sampai kita justru tidak ada perannya terhadap Petani Pak, ini ya salah satunya Pak yang kita lakukan selama ini, bagaimana kalau harga turun kita tetap bukan dengan membeli harga turun. Namun demikian ada juga yang menjadi masalah musibah dikala ada bencana alam Pak artinya, iklim yang tidak berpihak kepada Petani. Contohnya kemarin ada beberapa wilayah yang karena cuaca buruk Pak, Padinya itu rebah Pak atau belum masa panennya sudah rusak Pak, tapi kan kita harus beli Pak walaupun itu harganya murah, kita harus berpihak lagi Pak pada Petani. Sedangkan Pak Mohon izin, Bulog inikan semuanya penganggaran dukungan anggaran pengadaannya Pak itu kami kan meminjam Pak dengan bunga komersial Pak, nah itu juga menjadi masalah Pak, kalau kita menyerap dengan tidak ada jaminan bisa kita menjual berarti pasti rugi, pasti mutlak Bulog akan menanggung resikonya Pak. Tapi disini lain karena kita Pemerintah kita harus membantu masyarakat supaya masyarakat tidak dirugikan. Nah ini yang perlu menurut saya salah satu terobosan harus kedepan Bulog ini didukung dengan anggaran-anggaran negara yang memang untuk kepentingan negara Pak. Tidak seperti hari ini Pak kita CBP Pak, bahkan waktu itu Pak Presiden memerintahkan Bulog menjelang tahun politik ini harus minimal 3 juta Pak, kami siap Pak laksanakan dan 3 juta betul Pak lebih. Namun yang dijamin oleh negara pembiayaan sampai hari ini juga belum jelas Pak 1-1,5 juta dan beras yang kami jadikan CBP itu tidak bisa kami jual kecuali penugasan. Ini beras ini Pak mutunya akan turun Pak, terus-terus semakin kita simpan Pak makin turun. Ada jadi kendala juga Pak kadang bicara kualitas Pak, beras yang kita datangkan dari luar dengan beras yang kita serap dari dalam Negeri, itu secara kualitas Pak kita harus akui itu lebih bagus dari Luar Pak, tapi bukan berarti kita harus berpihak kepada Luar Pak, tidak, kita harus tetap berpihak kepada dalam Negeri. Hanya persoalannya Pak waktu simpan kita makin terbatas, ini yang jadi persoalan Pak, sehingga kalau CBP ini tidak segera digunakan atau Bulog tidak mendapat penugasan maka ancaman kerusakan mutlak beras itu ada ditangan Bulog. Sekarang siapa Pak yang menjamin kalau beras itu rusak, tidak ada Pak, karena busuk sendiri dan tanggung jawabnya Bulog. Kami sudah berkali-kali Pak mengusulkan beberapa beras kami yang sudah kadarluasa karena lebih dari satu tahun tersimpan dan rusak total Pak, ada dibeberapa daerah Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN AS, M.Si.):

Izin Pak Ketua, Pak Ketua izin sebentar.

Inikan Inpres Pak Inpres nomor 3 tahun 2012 tentang HPP dan ECBBP, kan lucu Inpres engga ada dana Pak kan lucu gitu, ini Inpres tapi engga ada dana yang menunggu Bulog, sekarang hutang 7 triliun, luar biasa ini Pak luar biasa.

Silakan Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak.

Memang faktanya demikian Pak, justru itu yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, situasi kondisi Bulog memang demikian. Jadi seperti satu yang ada di Oku Timur, di Oku Pak beras itu sudah total lost Pak artinya tidak mungkin kita gunakan dan itu berbahaya Pak. Begitu kita mengajukan untuk distorsal itu tidak turunturun Pak walaupun Menteri Pertanian sudah mengizinkan, tapi mekanismenya panjang Pak sulit yang sini belum sedia, ini belum ada, ini engga ada anggarannya. Kita bingung Pak ini beras makin lama makin busuk berkutu dan menyebar Pak, akhirnya terpaksa kita Karantina Pak, yang kemarin diinformasikan bahwa beras itu beredar oleh Bulog, padahal tidak Pak, beras itu betul-betul akan kita musnakan. Nah ini juga permasalahan perosalan yang ada.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Interupsi Ketua sedikit izikan.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Bapak ini saatnya sangat bagus sekali kita harus melakukan refreshsing stok Pak. Jadi harus ada suatu evaluasi pada saat sampai bulan ini atau dua bulan kedepan atau tiga bulan kedepan, beras yang memang masih dianggap layak itu berapa dan yang dianggap tidak layak itu ada berapa, dan kemudian yang memang dianggap tidak layak itu Bapak perlu sampaikan agar itu tidak menjadi tanggung jawab Bulog lagi, karena kalau itu yang terjadi maka Bulog akan menanggung kerugian, tetapi kalau kemudian refreshsing stock ya bahwa kita akan stock yang sudah tidak bagus ini mau diapakan silakan, mau dikasih untuk pakan ternak boleh tapi jangan sampai itu dibuang di laut ya, karena selagi itu masih bisa dimanfaatkan baik untuk ternak atau lainnya itu tidak ada masalah. Maka menurut saya dalam tiga bulan kedepan ini paling tidak perlu refreshsing stock, bahwa stock secara nasional berapa, yang masih layak berapa, yang tidak layak berapa, kemudian yang tidak layak pakai betul-betul sehingga kalau sudah ada refreshsing stock maka nanti tidak akan ada opini lagi apa yang disebut dengan beras yang tidak layak beredar, itu sudah tidak ada lagi.

Terima kasih Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak, kami lanjutkan Pak.

Inilah salah satu permasalahan Pak yang memang memerlukan terobosan-terobosan penanganan dan sebenarnya Pak kami menjadi Dirut satu bulan kami sudah mengevaluasi semuanya Pak tentang stock yang ada, bahkan itu sudah kami ajukan secara tertulis Pak mana yang masih bisa dipakai, mana yang harus diperbaiki Pak, mana yang sama sekali sudah tidak bisa bahkan harus seposal, bahkan pada saat itu kami ingat betul kami laporan dengan Pak Presiden Pak, Pak Presiden waktu itu memanggil kami dengan beberapa Menteri untuk itu segera di distposol, namun sampai hari ini tidak bisa terlaksana Pak karena anggaran di Kementerian Keuangan tidak ada Pak. Nah ini permasalahan juga Pak, tapi kami tetap tidak boleh itu beredar karena ini menjadi masalah. Tadi yang Bapak bilang, seandainya dibuang di laut pun menjadi masalah Pak karena pencemaran, yaitu Pak makanya dimusnakan juga menjadi masalah Pak. Nah satu-satunya kita berpikir Pak, bagaimana untuk memusnakan barang yang sudah harus dimusnakan Pak tapi masih bermanfaat.

Nah kemarin Pak kami laporkan juga kami kerja sama dengan salah satu pengusaha yang mau mengolah itu Pak menjadi bahan baku entanol Pak salah satunya, jadi masih bermanfaat masih ada nilainya Pak yang tadinya, siap-siap, sudah Pak. Namun demikian memang Pak, tadi salah satunya kalau kita rangkaian dari permasalahan yang sama, tadi kami sampaikan soal kami meminta supaya BPNT berasal dari kita, itukan salah satu langkah upaya Pak bagaimana stock kita ini terus berputas Pak, karena disatu sisi kami harus menyerap sebanyak mungkin tapi kita juga harus mengedarkan sebanyak mungkin Pak. Ini juga yang sampai saat ini belum berjalan Pak dan ini sudah upaya-upaya kami maksimal kemana-mana Pak kami sampaikan, bahkan itu tadi Pak begitu tadi yang Ibu Agustina sampaikan, begitu saya karena penyerapan sampai hari ini kita berjalan terus Pak, bahkan kemungkinan nanti sampai Agustus kita punya stock bisa 3 juta lebih Pak. Tapi persoalan besarnya adalah dikemanakan ini barang ini Pak, sedangkan uang yang kita pakai adalah uang pinjam dengan buang komersial. Nah ini sampai hari ini Pak BPNT saja kita tidak putus-putus Pak, berkali-kali kita rapat masih tarik ulur tarik ulur kepentingan Pak. Mohon izin, karena bagaimana pun Pak kita tidak mungkin Pak bicara beras kita ini diserap tapi tidak diberi peluang untuk disalurkan, sampai hari ini Pak. Maka waktu itu saya salah satunya Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN AS, M.Si.):

Pak-Pak saya melalui Pimpinan biar clear gitu Pak, saya bacakan saja Inpres yang nomor 2 saja Pak.

2. Menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan dulu raskin, sekarang BPNT.

Itu tugas Inpres yang kedua, inikan intruksi Presiden, sedangkan Kementerian Sosial itu juga pembantu Presiden, Bapak lapor saja ke Presiden bahwa pembantu Presiden Kementerian Sosial tidak mau bekerja sama dengan Bulog, selesai sudah nanti dipanggil itu Menteri Sosial-nya Pak, harus tegas Pak, kalau tidak akan busuk lagi yang 2,6 juta ton itu, mau dibawa kemana.

Terima kasih Pak.

Sengaja saya agak keras Pak, karena Bapak memang keras juga, sampaikan ke Presiden bahwa intruksi Presiden nomor 2, 3 eh nomor 3 tahun 2012 tidak dijalankan oleh Kementerian Sosial.

Terim kasih Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak.

Kami lanjutkan Pak, mohon izin Pak.

Jadi kebijakan Pak Presiden pada tanggal 3 Mei rapat di Kemeterian terkait waktu itu di Istana Pak, beliau justru sudah menegaskan bahwa BPNT maupun nanti kartu sembako berasnya harus suplay oleh Bulog, itu yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Forum terbuka Pak, itu dikuatkan oleh Pak Wapres dan dikuatkan oleh Menteri Perekonomian pada saat itu Pak semua dengar Pak. Realisasi dalam kita membahas permasalahan itu Pak sampai hari ini belum putus Pak tarik menarik Pak, besok Senin kita masih membahas lagi Pak. Yang akhir terakhir Pak pembicaraan ini, ya sudah kalau Bulog minta 70% suplaynya, ya sudah tapi di Pasar bebas. Bagaimana mungkin, sama saja itukan di Pasar bebas karena mohon izin Pak yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan tanda kutip CARTEL itu Pak, memang mereka memanfaatkan peluang itu Pak dan dia harus berkuasa tetap eksis, dimana kegiatan-kegiatan program mereka harus aktif disitu, nah ini juga didukung Pak persoalannya. Nah sedangkan Bulog yang Pemerintahan oto negara ini tidak diberi peluang, maka kami sedang berpikir seperti tadi Pak, bagaimana trobosan yang diberikan, kami ini sedang berpikir banyak Pak, termasuk meningkat bagaimana fungsi komersial kita. Sebenarnya inpvasi bukannya hanya beras saset saja Pak, kami sudah membuat beras lain-lainnya dan produk-produk pengembangan Bulog sekarang sudah banya Pak, hanya memang Pak mohon izin, kami memang belum bisa menguasai Pasarnya Pak, Pasarnya ini memang sudah dikuasai secara umum, bahkan selalu Pak namanya Bulog itu dicitrakan negative Pak yang beras tadi jelek Pak mutunya, yang bau berketu dan itu selalu diangkat Pak supaya apa, kita memang supaya tidak mendapatkan kepercayaan tadi Pak. Ya seperti BPNT ini ada keraguan Pak yang dicetuskan oleh bagian dari Pemerintah, Bulog apa mampu, nah masih diragukan.

F-PKB (Drs. H. IBNU MULTAZAM):

Ketua saya interupsi Ketua,

Yang beras sebagai suplayernya Bulog melayani BPNT itu sebaiknya dimasukkan dalam kesimpulan raker pada hari ini ya.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Baik terima kasih Pak, itu yang kami harapkan Pak karena dukungan dari Bapak itu penting Pak.

Karena mohon izin Pak, potensi kami rugi sangat besar Pak kalau kami tidak mendapatkan peluang untuk mensuplay dan kami sudah ada diseluruh Indonesia Pak, diseluruh wilayah Indonesia ini kami siap Pak. Nah kemarin terakhir ini mah belum putus Pak tapi sudah ada wacana lagi Pak kemarin bahwa Bulog itu mensuplay BPNT diwilayah yang terdalam Pak, jadi kita dikasih yang susahnya Pak yang tidak mungkin Pak yang harganya mahal dan tidak terjangkau kasihkan Bulog, nah inikan tidak adil Pak, tidak fair gitu. Memang sengaja dibikin Bulog supaya rugi Pak, nah inikan celaka ini kalau kita dibikin seperti ini Pak. Padahal Pak mohon izin, kemarin Pak Wapres Pak Yusuf Kala juga sudah menyampaikan berkali-kali beliau, tapi memang sampai saat ini belum menjadi kesamaan berpikir dari pembantu-pembantu bagaimana yang berkaitan dengan itu.

Inilah kami hari ini juga mohon dukungan Pak supaya mudah-mudahan ini segera terealisasi Pak, karena kalau tidak Pak ini anggota kami yang di lapangan mulai resah Pak, resah Bapak, ini kalau saya nyerap besok di gudang saya tidak bisa di gudang saya yang ketumpuan ini, nah semua ada keraguan. Walaupun Pak mohon izin, kami sudah memberikan kebijakan sekarang berahli kepada penyerapan gabah Pak, karena relative lebih aman kami menyerap gabah nah ini. Tapi keraguan tetap ada Pak karena apa, tidak ada jaminan untuk penyalurannya Pak. Nah ini salah satunya, maka mohon izin sekali lagi, kami terima kasih dari dukungannya untuk nantinya kami bisa mensuprot atau mensuplay BPNT Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN AS, M.Si.):

Maaf Ketua sedikit saja.

Bapak ada kedipan mata dengan Kemosos engga Pak?
Engga ada ya, ya tidak akan jadi-jadi Pak.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Izin Ketua, saya agak ini yaa,

Kalau Pak Presiden saja sudah menyampaikan semacam itu, kalau Pak JK sebagai Wakil Presiden juga sudah menyampaikan itu tetapi tidak bisa realisasi, ini sebetulnya ini, nah ini masalahnya ini dimana gitu loh, dan ini yang menjadi apa itu engga bisa lancar, ini ada apa si sebetulnya Pak, dimana itu pola pikirnya. Engga ada kaitannya dengan Menteri Perdagangan, engga ada, ini kita akan mencari persoalan ini. Iya kalau itu harus saya sampaikan karena satu atap. Ini persoalan kita tidak akan melibatkan lain-lain, kita akan mencari masalahnya dimana, nah kita akan mencari solusi. Nah ini kalau Pak JK saja sudah menyampaikan itu maka, saya pikir ini perlu perhatian dan kita perlu pembahasan secara serius Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ini masalahnya menyangkut ini saja ya, engga boleh melebar kemana-mana lagi.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Izin Pak Ketua,
Terima kasih Pak Ketua.

Kadang kita harus melihat ke belakang, kenapa, ini-ini khusus di daerah saya ya Dapil saya. Kenapa Kemensos sekarang ini menyerahkan ke daerah, khususnya ke Kabupaten atau Walikota ya, itu karena ada masalah, karena beras itu busuk diberikan kepada rakyat, ini yang menyebabkan Bulog sekarang ini menjadi cuci piring gitu loh, jadi kita jangan menjust yang Kemensos jelek, terus ini karena ada masalah, ada masalah, nah masalah inilah yang harus dibenahi, duduk bersama ya. Saya tidak menyarankan cuman saya bicara karena kenyataan di daerah saya, sampai ada peraturan Bupati untuk penyaluran-penyaluran itu dibagi zonanya kepada masyarakat gitu.

Demikian Pimpinan.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih.

Jadi apa yang disampaikan Bu Endang sangat betul Bu, bahkan bukan hanya masalah ini Bu, masalah saya dulu kan di Porli Kaptan saya dulu masih mendapatkan beras dari Bulog, tapi kondisinya memang sangat buruk Bu sehingga waktu itu terus diputus Bu kita tidak lagi mendapat suplay dari Bulog. Hari ini Bu pengalaman-pengalaman pelajar itu kami perbaiki, sehingga negara betul-betul hadir dan Bulog betul-betul memang yang diinginkan diharapkan oleh masyarakat Bu. Kami hari ini sudah tadi Bu, salah satunya yang memang sudah jelek ya kita tetap bertahan jelek Bu,

tidak ada diperbaiki-diperbaiki Bu karena diperbaiki juga kualitasnya sudah tetap buruk Bu.

Hari ini Bu yang kita serap dari dalam negeri begitu 6 bulan sudah berubah Bu warnanya, nah ini sudah lampu kuning buat kita Bu, tidak bisa dikeluarkan berarti pasti rusak, nah ini juga persamalah, maka kita harus cepat-cepat mengambil solusi jalan keluar yang terbaik kaya apa Bu, karena bagaimana pun ini adalah milik negara Bu, walaupun sampai saat ini pendanaannya masih dari Bulog Bu. Mohon izin belum lagi mekanisme dalam penagihan penugasan Pak, tadi ada hutang yang nanti saya jelaskan Pak, hutang yang dipakai tapi kita ditemukan BPKP, ketawan loh kita kok menyalurkan lebih tapi kok belum dibayar. Kita sedang nagih, belum dibayar bayar juga, belum ada respon gitu. Jadi banyak hal Bu, dan pembiayaan-pembiayaan yang harus kita tagihkan itu ada yang satu tahun baru dibayar, sedangkan bunganya satu tahun berjalan itu tanggung jawab Bulog, jadi Bulog sengaja dibikin supaya rugi. Nah inikan juga mekanisme yang harus diperbaiki, kita tidak mencari kambing hitamnya tapi kita yang menemukan persoalan permasalahan itu yang harus segera kita carikan jalan keluarnya, supaya kedepan tidak lagi terulang seperti ini, akibatnya nanti kawan-kawan di Bulog ini berpikir dari pada kita rugi, tadi yang Ibu Endang sampaikan, ya keluarkan saja, salurkan saja, nah inikan terjadi lagi nanti. Nah oleh sebab itu kami menjamin Pak hari ini dan semenjak kami menjadi Dirut Bulog kami menjamin kualitas, maka kami sortir seluruh sudah kami sortir Pak hari ini, kondisinya kaya apa, dimana sudah ketawan semua Pak. Maka ini pun karena pangan Pak, sekali lagi mohon izin Bapak Ibu sekalian, ini karena pangan yang ada batas kadarluasnya maka ini harus kita tangani Pak, maka tidak mungkin kita biarkan karena ini bukan barang mati, ya ini pangan yang memang ada nilai kadarluasnya, jadi yang harus kita tangani betul-betul dengan serius.

Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Bu Endang sangat betul, bahkan kami berpikir Pak, kami berpikir soal PAJALE, nah itu juga karena kewenangan kita Padi, Jagung, dan Kedelai. Hari inikan kita kalau soal Jagung sama Kedelai kita harus dapat penugasan baru bisa action kalau engga, engga bisa, karena Bulog ini sama sekali tidak punya kewenangan untuk menentukan, padahal kami yang tahu sebenarnya kondisi di lapangan bahwa perlu tidaknya kita impor, karena kebutuhan itu ada di wilayah kita masing-masing, tapikan tidak. Seperti gula yang lalu, tiba-tiba impornya banyak kita kelebihan bahkan gula dalam negeri bersaing dengan luar negeri. Petani berteriak, engga bisa ini engga laku, korbannya siapa Pak, Bulog juga yang disuruh ambil dengan harga yang luar biasa, padahal itu duit kita pinjam juga, nah alhamdulillah si sekarang bisa pelan-pelan laku Pak. Tapi jangan hal ini terulang kembali ke depan, sehingga Petani lagi yang tidak yang dirugikan.

Mohon izin banyak hal Pak yang kalau kita melihat di lapangan bahwa Petani kita ini sebenarnya hampir tidak semangat lagi untuk bertani Pak karena apa, mereka tidak mempunyai jaminan, ya jaminan keuntungan, jamin nanti bisa dibeli dengan harga layak tidak ada Pak, jadi mereka selalu ragu, yak arena system kita belum tertata

dengan baik. Maka kalau Bapak bilang tadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau ke depan kita harus sinergi, sebenarnya Pak saya sudah berusaha untuk besinergi, karena menurut kami yang soal di lapangan masalah pangan ini tidak bisa diserahkan oleh satu Lembaga saja, jadi siagai mana peran Bulog, bagaimana peran Menteri Pertanian, bagaimana Perindustrian, Perdagangan, termasuk Koperasi dan Menteri Desa itu semua berperan Pak, baru masalah pangan ini bisa kita tangani dengan baik. Nah sekarang ini memang belum.

F-PDIP (ONO SURONO, S.T.):

Maaf Pimpinan,

Saya tertarik tadi dengan yang disampaikan Pak Buwas bahwa memang masalah pangan ini tidak bisa ditangani oleh satu Kementerian dan kenapa dari awal saya dukung Pak Buwas kan menjadi Dirut Perum Bulog, karena mungkin saja pada saat bicara terkait dengan pangan dilihat dari kaca mata yang jauhlah misalnya, Pak Buwas kan latar belakangnya tidak dipangan, ini akan lebih terdeteksi dengan baik iya kan, nah sehingga yang menurut saya inilah yang harus kita dorong Pak. Iya kan tadi yang saya bicara diawal tadi perdagangan kemana, pertanian kemana iya kan, Bulog kemana inikan belum sinergis. Nah sehingga pada saat tadi bicara Pak Dholi ya mungkin inilah yang harus menjadi rekomendasi kita, kalau bisa ya langsung ke Presiden gitukan bahwa ini menjadi hal yang harus menjadi urgensi, nah sehingga bicara kedaulatan-kedaulatan pangan akhirnya diawal kenceng terus sekarang lemah lagi, terus bicara misalnya Kementerian Pertanian bicara nilai tukar petani naik, tapi kenyataannya tadi iya kan semangat petaninya belum baik iya kan, regenerasi petaninya belum berjalan, nah sehinggakan saya sependapat bahwa iya ayo kita dorong bersama.

Terima kasih Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak.

Kami lanjutkan Pak, jadi upaya-upaya Bulog untuk permasalahan pangan ini memang kita berupaya terus Pak, sampai pada akhirnya juga berkaitan dengan bagaimana ketersediaan barang ini, tidak di hanya soal beras Pak. Kami harus melaporkan juga Pak, kemarin upaya kami untuk bisa ekspor itu karena kami melihat potensi penyarapan kita besar tapi potensi untuk penyalurannya kecil, maka kita satu-satunya jalan maka kita harus ekspor. Ternyata permasalahannya panjang Pak dan tidak mudah mengekspor itu, karena selain persaingan dengan beras-beras dari produk lain termasuk mekanisme dalam ekspor ini, nah ini juga menjadi masalah.

Contoh saja kemarin kami sudah berkordinasi Pak, bahkan kami setiap kali dalam penugasan kami melalui rakortas Pak, namun yang terjadi Pak rakortas itu bukan jaminan bahwa Bulog bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena apa,

ternyataan utusannya rakortas bisa dibatalkan oleh satu Menteri saja dalam kepentingan. Kan itu keputusannya rakortas, kami sudah protes dan sudah menyampaikan ini kepada Menko Perekonomian yang memimpikan, tapi toh tidak bisa apa-apa juga, sampai pada akhirnya juga bawang putih itu melambung tinggi, bawang putih itu tidak terkendali dimasa masyarakat kita membutuhkan Pak. Nah inikan salah satu tanda kutip yang bisa kita baca, inilah permainan sebenarnya mafia itu yang dimaksud Pak dan itu sebenarnya mudah dibuktikan.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Interupsi Pak.

Saya sangat tertarik sekali, apa si masalahnya?

Kalau sekelas rakortas saja yaitu sudah bisa dianyulir dengan itu dan lagi kemudian dikaitkan dengan apa yang disebut dengan mafia itu tadi. Saya yakin kok kalau Pak Buwas ini sudah terbiasa memberantas mafia-mafia itu saya yakin kok, ini saya yakin Pak Buwas bisa itu. Tetapi persoalannya sekarang mari kita rumuskan bersama, dimana ini permasalahan ini agar betul-betul bisa tuntas Pak. Kita tidak bisa Pak, dan ini pada saat sekarang ini betul kita tidak perlu untuk bisa mengkambing hitamkan Menteri lain atau siapa pun, sekarang jalan apa yang harus kita tempuh, harus bagaimana, kalau sudah sampai Presiden kan sebetulnya sudah paling mentok itu, ya kalau di atasnya Presiden sudah PPB dan sudah kesana lagi sudah lebih ini lagi ya. Maka ini sekarang kita ini aja yang kita fokuskan bahwa langkah-langkah yang mau diambil Bulog dalam raker ini apa, dari jawaban-jawaban ini apa, nanti akan kita simpulkan bersama-sama Pak.

Terima kasih Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Baik Pak,

Tentunya perubahan kewenangan dari pada Bulog Pak yang perlu kita sempurnakan, karena sampai saat ini Pak kalau kita bicara pangan Pak, kita ini belum punya neraca pangan, nah ini yang harus kita buat Pak. Sebenarnya kita neraca jagung itu kaya apa si Pak, neraca kedelai itu kaya apa si Pak, neraca daging kaya apa dan yang lain-lainnya Pak sehingga kita bisa mengalokasikan. Kalau Pertanian kita ada gangguan cuaca berarti kita harus untuk mulainya kaya apa Pak, inikan bisa Pak dengan mudah tanpa kita harus mencari kambing hitamnya, wah ini yang punya kuasa, ini yang mengendalikan ini, tidak begitu Pak, inikan kita negara sinergi bagaimana kita mengambil langkah yang memang untuk kepentingan negara bangsa ini Pak, nah itukan pemikiran yang sebenarnya Pak tanpa ada kepentingan-kepentingan yang lain kecuali untuk kepentingan kebutuhan masyarakat bangsa ini Pak, kan gitu Pak. Sebenarnya tidak ada masalah Pak kalau kita semua berpikiran seperti itu. Mohon izin

contoh saja yang saya sampaikan tadi Pak, BPNT tadi suaranya dari Pak Presiden Pak, Presiden langsung rapat tanggal 3 itu Pak, disambut oleh Pak Wapres dan Menteri Perekonomian, akhirnya kami disuruh untuk diperintahkan oleh Pak Presiden bicarakan rapatkan kepentingan terkait, dibahas lagi Pak hari ini, kita 3 kali rapat ya muter-muter saja engga karu-karuan Pak. Padahal sudah gampang Pak iyakan, mudah udah perintahnya kepala negara kan harusnya selesai Pak, kita tinggal melaksanakan siapa berbuat apa bagaimana, selesai Pak persoalannya, kalau kita tidak ada kepentingan pribadi kelompok, kalau kita memang bicara kepentingan negara bangsa, selesai Pak soalnya. Nah ini yang Pak yang harus kita bangun mekanisme ini Pak, sehingga nantinya Bulog tidak bisa juga tidak mungkin Bulog kesulitan, terus Bulog ada ancaman kerugian, saya kira tidak Pak.

ANGGOTA:

Mohon izin Pak Ketua, menyambung Pak Fadholi.

Bapak dulukan di POLRI, pernah juga di NARKOBA dan sebagainya, Bapak kan tentu tau titik-titik mafianya itu yang ditanyakan tadi Pak, siapa si mafianya gitu Pak.

Itu saja Pak dijawab.

Terima kasih Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak.

Saya sebenarnya satu bulan jadi Dirut sudah bisa dan sudah berhasil menangkap Pak, hanya kelanjutannya karena saya tidak punya kewenangan Pak, hari ini saya pesiun sudah tunawirawan dan saya bukan pejabat POLRI, bukan penyidik lagi Pak, nah itu persoalan Pak, tapi kalau saya masih Pak, saya jamin Pak engga sampai satu bulan selesai Pak. Nah itu Pak sebenarnya karena mudah Pak, ini sangat mudah Pak, sebab kita bicara mafia apa saja itu mudah Pak dia punya gudang, dia punya jejaring tempatnya ada Pak, semua nampak Pak tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang abstrak, nyata Pak. Sekarang tergantung kemauan kita maunya apa, mau bagus atau mau tidak bagus, itu saja Pak persoalannya iya itu Pak.

Bukan soal keberanian saja Pak Ketua, kan sudah tadi Presiden sudah, rakorta sudah, tinggal Kementerian yang belum, berartikan sudah tau titiknya dimana, berartikan di Kementerian.

KETUA RAPAT:

Saya kira saya tengah saja, ih saya lihat Bapak seperti Ketua MK saja, kejar terus ya. Saya kira ini nanti kita bicarakan tersendiri, kemudian bisa dilanjutkan Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Baik terima kasih Pak, kami lanjut.

Tadi yang Ibu Endang bagaimana penanganan tikus-tikus di Indra Bulog, waduh Bu itu memang PR saya Bu yang sampai saat sekarang ini masih saya kerjakan, tidak mudah Bu ternyata membongkar jaringan mafia baik di internal maupun di eksternal tidak mudah, karena ini sudah membangun jejaring yang betul-betul mengakar. Tapi iya saya tidak pernah menyerah selama saya ada disini di Bulog ya saya harus merapihkan semua dari luar mau ke dalam, karena terjadinya mafia di luar itu pasti ada kerja sama dengan di internal, sudah pasti. Ya makanya saya Pak sudah melakukan tindakan-tindakan disiplin sebenarnya sudah banyak yang di Bulog ini, ada 2018 kemarin saya ada 64 orang, 2019 ini 35, yang sudah kita nojokan pasti 1, yang sudah kita pecat 1 dan ini menyusul kemudian. Karena luar biasa Pak kalau saya lihat luar biasa kita bicara opnum tapi opnumnya sudah mengakar dan ini harus diberikan contoh untuk supaya tidak menjadi penyakit menular kepada yang lain, nah itu Pak.

Ingsyaallah Bu Endang saya tetap komitmen untuk membenahi Bulog karena memang saya berangkatnya dari Abdi Negara, saya Aratul Negera apalagi saya latar belakangnya penegak hukum, jadi harus betul-betul hukum ditegakkan setegak tegaknya. Nah ini memang tapi kami tetap kerja sama Bu karena saya sudah Purnawirawan sudah bukan Polisi, saya kerja sama dengan PORLI, dengan Satgas Pangan, dengan Bareskrim, dengan Pak Kaporli saya minta dukungan, tanpa itu saya tidak bisa apa-apa, hanya cukup tau tapi tidak bisa apa-apa.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Pimpinan ada yang belum dijawab, target.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Iya ini Bu masih saat ini dari Bu Endang.

Bu, penanganan stok dulu Bu yang dua koma juta ton tadi mengantisipasi masalah turun kualitas justru itu tadi Bu salah satunya, salah satunya kami Bu. Nah kalau ini tidak bisa tertangani dengan baik Bu, saya sudah jamin pastikan Bu, Bulog oleh Bu, oleh Bu, karena apa, kita potensi kerugiannya besar sekali Bu dan bukan ratusan miliar, (T) triliunan. Nah ini ancamannya luar biasa dan ancaman bukan ancaman abstrak, ancaman nyata manakala kita tidak menangani dengan baik, dengan serius.

Tentunya Bu kami bagaimana Bulog kedepan targetnya, karena kami tadi ada dua Bu dua sisi yang satu penugasan yang satu komersial. Nah ini kita baru kaget Bu sekarang ini karena perubahan Bulog menjadi korporasi Bu komersil, yang kita ini sebenarnya Bu tidak terlatih untuk komersil dan kita belum siap jejaringnya Bu, baru memulai, maka kita harus bikin terobosan-terobosan Bu, maka kedepan harus kita

bangun Bu namanya komersial yang kuat, jejaring kita yang kuat, ritel-ritel kita, jejaring-jejaring kita, kordinasi kerja sama kita dengan para pengusaha yang lain Bu yang ada hubungannya dengan Bulog ini kita harus bangun Bu, terus kita harus menguasai juga bagaimana pangsa pasarnya, kondisi pasarnya. Nah ini juga sedang kita terus, kita sedang membuat itu membuat program perencanaan itu kedepan baik itu jangka pendek Bu, jangka sedang, jangka panjangnya kita sudah mulai membuat itu Bu. Nah hari ini juga termasuk bagaimana saya boleh membuat produk-produk komersial Bu, mengelolah daging itu tidak mentah demikian tapi jadi gitu Bu, membuat beras jangan kita hanya beras Bu tapi jadi tepung, jadi nanti suplay itu pangan jadi. Sekarang juga Bu dedeg itu kita jadikan pangan Bu, bahkan kue, makan yang dilatar belakangi dari dedeg itu kita Bu sekarang Bu, bekatul diantaranya Bu, nah ini sudah Bu. Tapi iya sistem yang harus kedepan dibangun untuk Bulog harus sistem yang baik Bu, termasuk modernisasi dan segala macam, termasuk tadi Ibu cerita soal bagaimana kita memproduksi beras yang bagus, kita harus punya player yang bagus, punya UPGP yang bagus Bu, kita harus membangun jejaring yang bagus. Ini sedang kami bangun Bu hanya satu memang, salah satunya Bu kami memakan PMN Bu yang tertunda-tertunda itu yang selalu dipertanyakan kapan, kenapa tidak terserap, kenapa tidak digunakan. Justru kami mengevaluasi bagaimana penggunaan anggaran yang besar itu memang betul-betul bermanfaat Bu, sesuai dengan fungsi dan perannya Bulog yang hubungannya langsung dengan Petani dan Masyarakat. Nah ini sedang kami adakan perubahan dan dalam waktu relative tidak lama saya kira ini kami akan selesai kita realisasikan Bu, ini diantaranya Bu Endang, nanti mungkin yang kekurangannya akan dibantu dengan Direksi kami yang mendampingi Bu.

Pak I Made Urip, memang peran komersial ini memang harus ditingkatkan seperti yang kami sampaikan tadi. UPGB kita juga sedang kita tingkatkan, yang sudah ada ditengah kota kita geser Pak.

KETUA RAPAT:

Pak kalau Anggota sudah keluar saya kira tidak perlu dijawab, Pak Made-nya lagi keluar, bisa dirangkai saja.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Iya baik Pak.

F-PG (ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, S.H., M.Hum.):

Pimpinan pendalaman sedikit lagi ada yang tertinggal tentang penggunaan PMN untuk digunakan sarana dan prasarana itu sangat ideal dan sangat strategis, memang demikian satu hal uang PMN itu tidak boleh dibuat membayar hutang, tapi saya melihat sangat strategis seperti ini iya saran saya juga berkerja sama dengan Kementan, Kementan itu ada yang namanya diberikan hibah untuk Petani misalnya raise mild,

terus misalnya dryers jadi itu sangat mahal sekali itu bisa membantu kerja sama dengan Bulog gitu nah itu salah satunya, tinggal lokasinya saja mana yang menjadikan daerah produksi gabah itu ada, nah seperti kelihatannya Pak Dirut sudah luar biasa, apresiasi Pak Dirut.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Bu Endang.

Jadi permasalahan-permasalahan yang kita membangun kordinasi dengan Menteri Pertanian Bu kami laporkan bahwa kami selalu sinergi dan berkerja sama dengan Pak Mentan, khususnya juga masalah peningkatan kualitas pertanian beras, Pak Mentan punya program seribu dryers dan ini sudah tersebar Bu, itu yang kami sinkronisasikan dengan UPGB-UPGB kita yang ada dan onvam-onvam kita yang ada Bu di wilayah yang kita sekarang dekatkan Bu dari programnya Pak Mentan sehingga bermanfaat Bu dan kelihatan hasilnya Bu. Maka perlu kami laporkan, beberapa yang kita sudah buat rismil itu penggilingan dan pengolahan beras Bu dari gabah di beberapa tempat, itu yang kita bisa menghasilkan beras premium plus Bu, karena plus itu tidak ada pecahannya sama sekali karena mesin yang kita gunakan adalah mesin yang berkualitas. Ini kembangkan terus Bu, sehingga tadi kami berani ekspor tadinya itu karena kami menyakini bahwa kami bisa memproduksi beras dengan kualitas bagus, hanya ternyata soal harga engga masuk Bu, nah ini yang menjadi, tapi yakinlah Bu saya ini senangnya memang berkerja sama sama siapa saja Bu kalau untuk kepentingan yang besar saya tidak ada peduli, pokoknya semua harus kita kerja samakan supaya kita bisa berbuat lebih banyak, itu Bu.

Terus masalah kedelai, Bapak Ibu sekalian.

Memang ini menjadi permasalahan dan kami sudah membaca Pak beberapa di kewilayahan yang bisa menjadi central-central produksi kedelai, oleh sebab itu kami mulai Pak membuat gudang-gudang untuk kedelai, nah ini dengan kami maksud kita bisa menampung menyerap kedelai dari petani-petani kedelai dan nanti memacu semangat untuk petani-petani kedelai, dan diperkirakan dari wilayah central-central kedelai itu meningkat Pak produksi, sehingga lambat laun akan mengurangi import dan masyarakat akan kembali mencintai produk dalam negerinya, nah ini harus kita mulai Pak, tapi tentu kita juga kerja sama dengan Menteri Pertanian Pak tidak bisa berdiri sendiri.

Seperti halnya juga dengan bawang Pak, bawang merah kita sudah membuat costs to rate yaitu charge Pak ini kita bangun kembali beberapa Pak, ini sentral-sentral bawang merah seperti di Padang nanti di beberapa wilayah kita akan membangun Pak itu costs to rate costs to rate itu untuk bawang merah, sehingga nanti Pak kita tidak seperti panen raya terus petani harganya jatuh terus meraka kebingungan kita

menyerap kita tidak punya tempat untuk menyimpan, akhirnya mubazis lagi, rusak lagi, kerugian lagi Pak. Nah ini juga kita bangun, termasuk next Pak kedepan kami sudah dengan Kementerian Pertanian ingin mewujudkan bagaimana bawang putih itu kita bisa menanam dan menghasilkan, paling tidak secara bertahap kita bisa memenuhi kebutuhan kita, ini sedang diupayakan oleh Menteri Pertanian. Kita kerja sama Pak dengan beberapa perguruan-perguruan tinggi Pertanian, ini sudah dimulai Pak bahkan besok pun kita ada kerja sama dengan Perguruan Tinggi (suara kurang jelas) untuk melakukan bagaimana kerja sama Pertanian dengan penyerapannya sehingga petani tidak lagi terbelenggu dengan tengkulak-tengkulak Pak dan petani diuntungkan dengan pertaniannya hasilnya, ini sudah kita merintis Pak.

Nanti Pak mohon izin Pak, untuk pinjaman beras Pemerintah nanti biar dilengkapi dijelaskan oleh Dir Opp Pak karena yang membidangi.

Dan mengenai suplay BPNT Pak, memang kita menggunakan beras premium Pak, kami justru lambat laun akan menghilangkan beras medium Pak karena pemahaman kami jangan karena masyarakat ketidak mampuan terus dikasih beras medium, kita bisa produksi beras premium kenapa kita harus pake medium Pak, toh kalau kita yang memproduksi sendiri harganya murah Pak. Oleh sebab itu kami sudah mulai merintis bagaimana kita sekarang menyerap gabah Pak dan memproduksi beras sendiri tidak melalui pihak ketiga, karena kalau pihak ketiga pasti kami diakalin Pak, pasti selalu dibikin malah karena mereka sudah mendapatkan keuntungan atau mengambil keuntungan.

Nah ini yang harus dibangun Pak Bulog kedepan, termasuk tadi Ibu Endang bilang, bagaimana kedepan Bulog itu. Lah iya memang kita harus membangun semuanya Bu, kalau tidak iya kita ketergantungan engga mungkin bisa eksis Bu, karena sampai hari ini kita sudah terbelengguh dengan kebiasaan kita bahwa kita melalui pihak ketiga, nah ini juga kita senang dengan pihak ketiga karena cari amannya Bu. Nah ini juga tidak boleh Pak. Kedepan harus kita bangun bahwa kita ini memang petugas-petugas yang tugaskan oleh negara untuk di depan, nah ini sudah kita lakukan.

Kemudian untuk BPNT selain kita siap Bu diseluruh wilayah kita juga membangun jaringan-jaringan RPK, jadi rumah-rumah pangan kita ini kepanjangan tangan kita untuk masyarakat-masyarakat yang mendapatkan BPNT itu dengan mudah mendapatkan beras dan kita ada penawaran yang kita berikan kepada masyarakat bahwa beliau mau mengambil beras medium atau premium silakan, beliau mau beli beras beberapa jenis silakan dan kita akan memberikan bukti kepada masyarakat penerimaan BPNT dengan dia bisa mencoba beras yang akan dibeli Bu, dengan ditempat-tempat itu kita siapkan wujud tanak, disitu ada tanak dia bisa mencoba beras yang mau dibeli sama masyarakat ini seperti apa si yang mau diambil. Jadi jangan nanti seperti yang lalu Bu Endang, tiba-tiba pulang berasnya bau, tiba-tiba berasnya tidak bisa dimakan ada kutunya, tidak Bu, itulah pertarungan kita sebenarnya Bulog. Untuk Bulog kedepan beda, yang lalu menjadi pembelajaran Bulog yang lalu tapi tidak untuk

terulang. Tapi ya juga harus tadi Bu didukung bagaimana kita bisa tetap berputar stok beras kita terus menerus dengan kegiatan-kegiatan tadi Bu.

Jujur saja Pak kami juga mau berharap dan menginginkan bahwa pangan kita tidak ketergantungan dengan import Pak dan kami punya keyakinan dengan Menteri Pertanian bahwa itu bisa terrealisasi, mana kala kita semua serius Pak menangani Pertanian ini. Nah ini juga sedang kita didik, kita buat blueprintnya kaya apa yang kedepannya itu masa swasembada pangan untuk negara kita kaya apa dari berbagai aspek sumber pangan.

Pak ... memang nanti akan kami buat secara rinci Pak tentang uraian penyaluran dan kebutuhan.

Saya kira masalah produk sudah.

Nah kemudian masalah dua setengah juta stok yang ada di kita, iya ini memang Pak nanti kedepan ini yang kita harapkan tadi dengan BPS yang kedua, kami perlu sampaikan tadi yang telah kami sampaikan bahwa hari ini kami mesti menyerap Pak, rata-rata kami perhari mesti menyerap 10.000-11.000 ton rata-rata dan kita prediksi sampai Agustus ini kita masih Pak menyerap, berarti tambahan kita bisa mencapai 600.000 ton, berarti kalau sekarang sudah 2 sekian Pak dengan tambah 600 iya pasti kita 3 juta Pak, iya tapi akan menjadi masalah manakala tidak dapat bersih-bersihannya Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Mohon Ketua sebentar Ketua, ini masalah kita soalnya.

Saya berikan solusi Pak, mudah-mudahan ini bisa dijalankan.

1. Pertama kerja sama dengan DMI kan sudah (Dewan Masjid Indonesia), Masjid itu sekarang jumlahnya hampir 1 juta, Ketua DMI Pak Yusuf Kala terakhir bilang 800 ribu Masjid, kalau satu Masjid ada 25 orang saja (x) 1 juta, itu yang pertama solusi.
2. Yang kedua Pesantren, Pesantren itu di 2016 28.194 Buah, Santrinya 4 juta.

Dua ini saja dikelola dengan baik selesai sudah DMI sama Pesantren, ini solusi yang saya tawarkan.

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak.

Dan itu sudah kami lakukan Pak, itu sudah kami lakukan Pak bertahap Pak, bahkan kami juga melakukan Pak karena kami ini kebetulan jadi (KAKWARNAS) maka kami membangun juga Pak Rumah Pangan Pramuka Pak. Pramuka itu seluruh Indonesia pengurusnya 2,7 juta orang Pak, nah ini sudah menjadi jejaring kami Pak,

kalau memang itu nanti bisa masuk Pak memang persoalan ini selesai Pak, ketahanan pangan selesai Pak, hanya tetap mekanisme tadi kalau kita mau berpihak kepada petani maka apapun produksi petani itu harus bisa kita serap Pak, tentunya setelah kita serap harus bisa kita manfaatkan disalurkan dimanfaatkan, nah ini Pak yang memang nanti sistem yang harus kita bangun kedepan seperti itu Pak. Kami terima kasih Pak masukan dorongan Bapak dan itu sudah kami lakukan Pak.

Bahkan kami ingin juga Pak, salah satunya kami sudah sampaikan Menteri BUMN bahwa Menteri BUMN mengiteruksikan kepada seluruh jejaring BUMN untuk memanfaatkan juga produksi beras dari Bulog. Kami sekarang sedang bekerja sama dengan mendatangi kembali TNI POLRI Pak, kami sudah bicara dengan Panglima TNI, dengan Kapolri untuk kedepan Pak POLRI dengan TNI disuplay berasnya dari Bulog kembali Pak, dengan jaminan tentunya Pak seperti yang disampaikan oleh Ibu Endang tadi jaminan kualitasnya bagus Pak, jangan karena mentang-mentang Prajurit dikasih apa saja mau atau dikasih ala kadarnya iya jika kita tidak manusiawi. Nah ini yang sekarang sedang kami rintis, insyaallah Pak kalau semua nanti jalan Pak yakinlah tidak ada persoalan lagi Pak, maka sekarang kita mencari jalan solusi yang terbaik kaya apa yang harus kita lakukan kedepan sehingga tidak ada persoalan lagi soal pangan Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Sedikit melalui Ketua lagi.

Sudah berapa tahun Pak kerja sama dengan DMI dan apa evaluasi yang terus dilakukan?

Karena saya kebetulan juga pengurus DMI.

Mohon maaf sekali lagi,

Diwaktu kemarin menjelang puasa dan Idul Fitri kan seharusnya Bulog dengan DMI harus gencar memasarkan ke bawah tapi ternyata, ini mohon maaf sekali lagi mohon maaf, tapi ternyata tidak. Artinya, mohon kedepan kerja sama yang sudah dilakukan dengan DMI, kalau Pesantren saya belum dengar, ini baru masukan saja, tapi DMI sudah. Pesantren itu Pak kan boarding Pak, dia membutuhkan beras dan sekarang berasnya mahal Pak, sehingga anak-anak yang di Pesantren itu mahal bayarnya, minimal sekarang 7,500.000/perbulan, tapi kalau berasnya disalurkan oleh Bulog mungkin bisa saja mereka cukup 1 juta sebulan membayar di Pesantren. Inikan solusi yang sungguh luar biasa untuk Umat Pak.

Terima kasih Pak.

Mohon penjelasan sudah berapa yang disuplay ke DMI Pak dan kalau memang Pesantren belum Pak kita bisa bekerja sama nanti Pak dengan Ketua Pesantren seluruh Indonesia.

Terima kasih Pak Buwas.

DIREKSI PERUM BULOG:

Terima kasih Pak.

Sebenarnya kami sudah tanda tangan MUI juga Pak sekarang sudah berjalan, hanya yang aktif ini di JABODETABEK yang aktif, karena kan kami mensupport tuh sesuai dengan permintaan mereka, jadi begitu minta termasuk di Pesantren-Pesantren Pak, jadi Pesantren itu justru berharap dari kami Pak, karena tadi Pak berasnya stabil kita jamin kualitas Pak, mudah didapatnya kita ada dimana-mana Pak. Itu sekarang berjalan Pak, kita support terus jalan, iya Pak sudah-sudah-sudah jalan Pak, sudah lama itu berjalan Pak dan sekarang komunikasi terus Pak dengan Belia Pak Direktur Operasional dengan Direktur Pengadaan saya komunikasi terus itu Pak.

Terima kasih Pak.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Saya kira ini Pak yang bisa saya jawab, mungkin nanti ada dijawab oleh Direksi-Direksi saya yang lainnya ini berkaitan dengan apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin juga Pak kami juga perlu sampaikan bahwa memang hari Selasa kami juga ada Rakortas rencananya Pak, termasuk hari Senin ada pembahasan tentang BPNT, nah Selasa ada rakortas juga Pak tentang masalah HPP, gula, dan yang lain-lainnya Pak. Nah situ juga akan kami sampaikan tentunya evaluasi kami selama ini Pak menjadi Dirut Bulog, persoalan-persoalan yang tadi Pak, kendala-kendala yang terjadi yang harus ditangani bersama dan komitmen bersama, ini akan kami sampaikan. Ingsyaallah Pak dari kegiatan itu mudah-mudahan kedepan apa yang sudah menjadi keputusan dan bahkan apa yang sudah menjadi perintahnya Pak Presiden itu betul-betul ter-realisisasi dengan baik Pak.

Saya kira ini, mungkin ada tambahan dari Direksi saya mungkin soal jumlah pinjaman tentunya yang masalah berkaitan dengan pinjaman Pemerintah.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Sebelum Pak Buwas akhiri melalui Ketua,

Bisa kita undang untuk Bapak untuk ke Sumatera Pesantren di Sumatera untuk bikin MOU, Jawa kan sudah, Sumatera kan belum.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Siap Pak, kapan saja Pak kami siap Pak siap.

DIREKSI PERUM BULOG:

Izin Pak Pimpinan menambahkan sedikit Pak, terkait dengan pengelolaan CBP Pak ini disampaikan diatas bahwa ada dua pengelolaan Pak yang pertama tahun 2017 Pemerintah masih menganggarkan dua setengah triliun (2,5T), kemudian nanti dibayarkan ke Bulog jadi stoknya menjadi 250 ribu ton Pak. Untuk yang 2019 itu akan dilakukan penggantian sistem penggantian, jadi dari dua setengah triliun (2,5T) yang semula hanya dapat 250 ribu ton bisa mendapatkan 1-1,5 juta ton, jadi hanya mengganti antara selisih harga jual dengan harga bukannya Bulog dan itu lumayan membantu sehingga buangnya cukup besar Pak. Jadi sampai dengan hari ini Pemerintah sudah meminjam stok Bulog sekitar 295.000 ton, itu sekitar hampir tiga ratus sebelas miliar (311M), jadi kalau dari anggaran 2,5 triliun itu baru terpakai sekitar 311 miliar Pak.

Ini sementara demikian Pak, terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih,

Pak Ketua, Anggota Komisi IV yang kami hormati

Demikian yang bisa kami sampaikan, selanjutnya kami kembalikan kepada Ketua, kami mohon masukan dan saran.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Direktur Utama Perum Bulog dan jajarannya,

Saya kira jawaban tadi sudah cukup dan pertanyaan-pertanyaan juga sudah cukup. Dan kami sekali lagi memberikan apresiasi kepada Bapak dan saya juga terima kasih Bapak tidak terpancing, saya tau Bapak tidak boleh dipancing-pancing bisa meledak, jadi saya agak serem sedikit mohon maaf.

Kemudian kalau sudah tidak ada lagi tanggapan atau permasalahan, maka kita melanjutkan kepada draft pembacaan kesimpulan.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Supaya kelainannya jelas Bulog ini kan tadi belum dijawab, mau komersial atau tetap dengan interuksi Presiden nomor 3 2012, itu belum dijawab Pak, supaya ini jelas nanti kesimpulannya dimana. Saya tadi malah mau masukin kesimpulan, sudahlah Bulog menjadi Komersial saja selesai, tapi kan belum dijawab.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Baik terima kasih Pak.

Jadi mohon izin Pak,

Pada prinsipnya kan kami ini adalah aparat penugas dari petugas dari negara, jadi kami bagaimana keinginan negara ya kami hanya tinggal melaksanakan Pak, nanti mana yang terbaik menurut negara Bulog ini megan dua peran itu atau komersial iya kami tinggal menunggu saja Pak. Kami siap saja Pak mau dijadikan komersial murni kami siap Pak, mau dijadikan dua yang tadi kami siap. Tapi tentunya mana yang terbaik dan harus bagaimana kita menjalankan peran dan fungsi itu.

Saya kira itu Pak.

KETUA RAPAT:

Cukup ya,

Sekarang saya mau membacakan draft kesimpulan dan mohon persetujuan dari saudara-saudari sekalian.

Kesimpulan/Keputusan Rapat Dengan Perum Bulog dan Komisi IV DPR RI;

1. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi kepada Perum Bulog atas realisasi penyaluran rastra hingga tanggal 19 Juni 2019 sebesar 279.433 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tiga) ton atau (94,84%), dari Surat Perintah penyaluran SPP bulan Januari s/d Juni 2019 sebesar 294.654 (dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat) ton dan atau (130,8%), dari RKKP tahun 2019 sebesar 213.520 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus dua puluh) ton.

Apakah dapat disetujui teman-teman Anggota setuju?

Anggota setuju?

Bapak setuju?

Setuju.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan subsidi pangan untuk Perum Bulog pada RAPBN tahun 2020 sebesar Rp12.616.155.138.290,00 (dua belas triliun enam ratus enam belas miliar seratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang akan dialokasikan untuk pengadaan beras sebesar Rp5.861.400.000.000,00 (lima triliun delapan ratus enam puluh satu miliar empat ratus juta rupiah), dan komoditi selain beras, jagung, kedelai, gula dan daging sebesar Rp6.754.755.138.290,00 (enam triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tiga puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Dapat disetujui atau dari Bapak?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Prinsipnya oke, tapi dalam penulisan akuntansi harus ada buka kurung dengan huruf.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oh Rupiahnya ya,
Tolong diperbaiki, sudah?
Terima kasih sudah diperbaiki.
Perlu dibacakan kembali? Cukup ya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Maksudnya dibuat kurung ditulis dengan huruf supaya Pak Ketua tidak salah menyebutnya.

KETUA RAPAT:

Ahli Bahasa tidak perlu ditulis, cukup titik dengan koma, gitu ya.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Interupsi Ketua, eh mohon,

Tadi Pak Buwas mengatakan bahwa untuk membeli Gabah dan Beras itu pakai bunga, ada bunga gitu.

Tanggung hutang Bulog itu berapa dan kemudian ini masuknya kemana?

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Hutang kita itu dua puluh tujuh triliun kurang lebih Pak, sekarang, tidak Pak, ini tuh untuk beli lagi bergulir Pak, jadi kita tidak lagi untuk menjadi hutang Pak, nambah Pak, jadi kita ada alokasi anggaran yang disubsidi supaya kita tetap bisa pengadaan. Dan mohon izin Pak, pengadaan ini bukan berarti kita pengadaan harus import Pak, untuk penyerapan dalam Negeri Pak, siap-siap Pak siap-siap, siap-siap baik Pak.

KETUA RAPAT:

Setuju ya, ok.

(RAPAT: SETUJU)

Kesimpulan ketiga.

3. Komisi IV DPR RI mendukung rencana Perum Bulog untuk berperan dalam pengadaan beras program bantuan pangan non tunai agar stok beras yang ada dapat segera tersalurkan sehingga meningkatkan volume penyaluran penugasan Bulog, selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk berkordinasi secara intensif dengan pihak PT yang terkait agar rencana yang dimaksud dapat segera dilaksanakan.

Bagaimana teman-teman sekalian, Anggota?

Pakai ini Pak, pakai mic Pak, pakai mic.

Saya berikan kesempatan Bapak, silakan Pak.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Iya kita sudah dengar banyak dari Pak Buas kalau soal dukung mendukung sudah. Persoalannya adalah, apakah Kementerian yang terkait bisa melaksanakan keputusan yang sudah dilaksanakan dirakortas sama dengan interuksi Presiden.

Nah sekarang bagaimana penekanan dinomor 3 ini supaya Kementerian terkait bisa dengan legegowolah menerima usulan kita?

Terima kasih.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Mohon izin Pak,

Yang 3 itu bukan pengadaan, dan adalah menyalurkan, penyaluran Pak.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Mungkin perlu dipertegas Pak.

Jadi Komisi IV DPR RI menyetujui rencana Perum Bulog untuk melakukan penyaluran beras melalui program bantuan pangan non tunai, saya pikir begitu jadi tegas gituloh. Jadi kalau itu mendukung kan kita engga ikut bertanggung jawab, tapi kalau kita menyetujui berarti kita ikut bertanggung jawab.

Iya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Juga demi memperkuat ya, tadi saya dengar dari Pak Hasanuddin ada intruksi meinpres itu nomor dua kalau engga tidak salah ya. Nah nanti ada lagi itu 2015 untuk perubahan harga, tapi untuk penyaluran Bulog ini BMPT ada intruksinya, masukan.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Tugas public Perum Bulog merupakan amanat dari Inpres Nomor 3 tahun 2012 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran oleh Pemerintah yang merupakan pengejawantahan amanah intervensi Pemerintah untuk pengadaan gabah/beras.

KETUA RAPAT:

Saya kira Undang-Undang itu sudah intruksi Presiden enggak berlaku karena sudah ada yang nomor 5 tahun 2015 ya.

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Isinya Pak sama, ohiya sama isinya nomornya saja berubah.

KETUA RAPAT:

Jadi saya kira ini kita setuju ya, saya bacakan kembali kesimpulan nomor tiga.

Komisi IV DPR RI menyetujui penugasan Perum Bulog untuk menyalurkan beras melalui program bantuan pangan non tunai agar stok beras yang ada dapat segera tersalurkan, sehingga meningkatkan volume penyaluran penugasan Bulog. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Perum Bulog untuk berkordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait agar rencana dimaksud dapat segera diselesaikan.

Setuju, setuju ya Bu, setuju ya?

Masih?

Oke silakan-silakan.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Sedikit saran Pak,
Menyetujui jangan rencana Pak, langsung menyetujui penugasan Perum Bulog Pak.

KETUA RAPAT:

Jadi menyetujui penugasan kepada Perum Bulog,
Sudah betul ya, setuju ya?
Pak Hasanuddin?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Setuju Pak.

KETUA RAPAT:

Kok masih baca-baca terus Bapak, baca sms atau apa itu Pak?
Undang-Undang?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Bukan Pak, yang nomor 5.

KETUA RAPAT:

Oh iya baca aja Pak, tapi saya ketok ini ya?
Setuju iya?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Iya Pak.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Sekarang kesimpulan nomor 4.

Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk merevisi Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan kekinian dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Perum Bulog sebagai penyambah ketersediaan harga beras.

Anggota coba tolong didiskusikan nomor 4 ini, lebih sama nomor 3 ya, mirip-mirip ya?

F-PPP (Drs. H. HASANUDDIN A. S., M.Si.):

Engga, merevisi itu Pak yang perlu diiniin, merevisi lama itu.
Merevisinya itu diganti Pak, iya jangan merevisi.

KETUA RAPAT:

Evaluasi.

Mendesak Pemerintah, hasil evaluasi kan direvisi.

Iya seharusnya evaluasi sudah kita laksanakan sudah berkali-kali, sekarang segera direvisi maksudnya begitu, inikan sudah tindak lanjut, ini selalu baru, sudah seringkan, sudah sering dievaluasi ini.

Bagaimana Anggota?

Tanya Pak Bulog, bagaimana?

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Pak Ketua - Pak Ketua sebentar Pak,

Mohon untuk bisa dijelaskan menurut Pak Buwas dari intruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pangan ini menurut Bapak sudah cock apa belum, kemudian yang diperlukan apa, ini yang kita harus ini, jadi apa yang diperlukan oleh Bapak kita dukung gitu loh.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Baik terima kasih Pak.

Pada prinsipnya karena inikan sudah sekian tahun berjalan Pak, harga gabah ini kan tidak seperti pada ditetapkan atau pada kondisi tahun 2015 Pak ini masih 4070 Pak dengan fleksibilitas, jadi iya perlu direvisi Pak, betul Pak.

Disesuaikan dengan harga iya kekinian Bu harga saat ini atau perkembangan harga, karekan harga sekarang Bu rata-rata kalau di Petani 4500 Bu sampai 5000 Bu.

Iya dulu sudah dipastikan dengan fleksibilitas jadi 4070.

Tidak bisa Pak, yang dipastikan adalah 3700 dengan fleksibilitasnya 10% jadi 4070, jadi kita hanya bisa maksimal 4070.

Iya karena sampai saat ini kita engga bisa mendapatkan gabah di lapangan dengan harga itu Pak dan kalau kita paksakan yang tadi disampaikan oleh Bu Endang, ya berarti kita tidak berpihak kepada Petani Pak, berarti kita memaksa Petani untuk menjual murah kepada Negara Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu kita tampakan saja khusus untuk HPP dan Gabah dan Beras disesuaikan dengan harga kekinian.

Tambahin saja dulu.

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Pak Ketua, saya pikir tidak usah membatasi masalah harga khusus itu, karena nanti ketika nanti ada suatu kupasan yang lain ada kemungkinan termasuk penyalurannya dan lain sebagainya itu kan perlu ada revisi. Maka saya sepakat bahwa kalau revisi itu hanya disesuaikan dengan perkembangan saat sekarang, sudah gitu saja, jadi engga usah dengan ada itu harganya engga usah, nah nanti tinggal dari Bulog yang akan diajukan untuk direvisi apanya saja, termasuk penyalurannya kan bukan sekedar ininya.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT:

Ini tinggal ditambah saja pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan kekinian gitu ya bisa, jadi tambahin saja dalam rangka memaksimalkan peran sesuai perkembangan iya, sesuai dengan perkembangan harga, pakai harga engga, perkembangan kebijakan macam-macam bukan harga saja, jadi tidak perlu harus sesuai harga dong, perkembangan kekinian. Seperti Pak Aka Bulog bilang, jadi kita harus akomodasi dengan kekinian nah gitu. Mudah-mudahan perubahan kabinet kan kekinian juga kan, nah siapa tau Bapak naik bisa merubah ini kan semuanya ya, begitu bagus itu.

Saya ulangin kembali nomor 4.

Komisi IV DPR RI mendesak Pemerintah untuk merevisi intruksi Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras dan penyaluran beras oleh Pemerintah sesuai dengan perkembangan kekinian dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Perum Bulog sebagai penyambah ketersediaan harga beras.

Setuju ya?

F-NasDem (Drs. FADHOLI):

Pak Ketua,

Ini ada dua kata yang memang ini perlu dipisahkan ini.

Ketersediaan harga beras itu dua hal yang berbeda, ketersediaan beras maksudnya ya.

KETUA RAPAT:

Setuju?

Saya kira Bapak mau usulkan lain, sama saja yaa.

Saya kira disetujui ya dari Anggota, Pak Bulog?

Ok ya.

(RAPAT: SETUJU)

Masih ada lagi?

Cukup ya.

Saya kira cukup kesimpulannya sudah disetujui.

Kami persilakan Pak Bulog untuk bisa memberikan tanggapan sekaligus pesan dan kesan sebagai penutup.

DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG:

Terima kasih Pak Ketua, Wakil dan Anggota Komisi IV DPR RI dari apa yang telah dibahas dan dipaparkan oleh kami mendapat suatu tanggapan dan penyempurnaan. Sekali lagi kami terima kasih atas dukungan dan masukannya, tentunya kami berharap bahwa dukungan terhadap Bulog untuk menuju Bulog kedepan yang lebih baik kami selalu mendapat support dan dukungan dari Bapak Ibu sekalian, dan lebih kurangnya kami mohon maaf.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

KETUA RAPAT:

Demikian Rapat Dengar Pendapat ini telah selesai dilaksanakan.

Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat hari ini dan atas nama Pimpinan, dan juga para Anggota kami mohon maaf bila selama kami memimpin rapat ada kekurangan dan kekhilafan.

Dengan mengucapkan ***Alhamdulillahirrobbil'amin*** Rapat Dengar Pendapat ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

(KETOK 3 KALI)

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14:50)

Jakarta, 20 Juni 2019

a. n. Ketua Rapat,
Sekretaris Rapat

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo

NIP. 196301221991031001

